

**PEMBANGUNAN DESA: PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT**

(Skripsi)

Oleh

EMANUEL JALU PANDEGA

NPM 2016011049



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2025

**PEMBANGUNAN DESA: PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT**

Oleh

EMANUEL JALU PANDEGA

2016011049

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU SOSIAL**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PEMBANGUNAN DESA: PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI MASYARAKAT

Oleh

EMANUEL JALU PANDEGA

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membangun partisipasi masyarakat, melihat efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa serta meningkatkan partisipasi yang baik di masyarakat Desa Gantiwarno Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data berupa wawancara oleh sepuluh informan yang diantaranya yaitu Kepala Desa, Seluruh Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Umum Desa Gantiwarno, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Melalui hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa: Pertama, Badan Permusyawaratan Desa telah menjalankan perannya untuk mengajak masyarakat ikut dalam kegiatan Musrenbangdes melalui kegiatan kemasyarakatan dan undangan yang diberikan kepada masyarakat. Kedua, Bentuk Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat berupa hadir dan menyampaikan aspirasinya melalui kegiatan Musrenbangdes, sedangkan untuk pelaksanaan, dan evaluasinya masyarakat tidak diberikan wadah oleh pemerintah desa yang nantinya dilakukan oleh orang yang mempunyai kepentingan. Ketiga BPD tidak memiliki acuan pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan, BPD lebih mengikuti alur yang diberikan oleh Kepala Desa sebagai kepala daerah yang mempunyai kuasa, sehingga tugas dan fungsi BPD dalam pemerintahan tidak efektif. Keempat Konformitas Sosial dan komunikasi yang terjaga antar pemerintah desa dan masyarakat menjadi kunci untuk masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan desa. Peran yang dilakukan oleh BPD menurut Teori Peran yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto sudah relevan namun tidak dilaksanakan dengan maksimal sehingga partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Peran, BPD, Partisipasi, Musrenbangdes, Aspirasi, Konformitas

ABSTRACT

VILLAGE DEVELOPMENT: THE ROLE OF VILLAGE CONSULTATIVE BODIES (BPD) IN BUILDING COMMUNITY PARTICIPATION

By

EMANUEL JALU PANDEGA

This study aims to describe the role of the Village Consultative Body in building community participation, see the effectiveness of the performance of the Village Consultative Body and increase good participation in the community of Gantiwarno Village, Belitang III District, East Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra Province. This research uses qualitative research methods by collecting data in the form of interviews by ten informants, including the Village Head, all members of the Village Consultative Body, and the General Public of Gantiwarno Village, Belitang III District, East Ogan Komering Ulu Regency, South Sumatra Province. Observation and documentation were also conducted to obtain data. Through this research, it can be seen that: First The Village Consultative Body has carried out its role to invite the community to participate in Musrenbangdes activities through community activities and invitations given to the community. Second The form of participation carried out by the community is in the form of attending and conveying their aspirations through Musrenbangdes activities, while for the implementation and evaluation, the community is not given a forum by the village government, which will be carried out by people who have an interest in this matter. Third, The BPD does not have a guideline reference in carrying out its duties and functions in government, the BPD follows the flow given by the Village Head as the regional head who has the power, so that the duties and functions of the BPD in government are ineffective. Fourth, Social Conformity and maintained communication between the village government and the community are key to the community participating in village activities. The role performed by the BPD according to the Role Theory conveyed by Soerjono Soekanto is relevant but not implemented optimally so that participation by the community does not go well.

Keywords: Role, BPD, Participation, Musrenbangdes, Aspiration, Conform

Judul Skripsi : **PEMBANGUNAN DESA: PERAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DALAM MEMBANGUN PARTISIPASI
MASYARAKAT**

Nama Mahasiswa : **Emanuel Jalu Pandega**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2016011049**

Program Studi : **Sosiologi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. **Ketua Jurusan Sosiologi**

[Handwritten Signature]

Damar Wibisono, S.Sos., M.A.
NIP. 198503152014041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

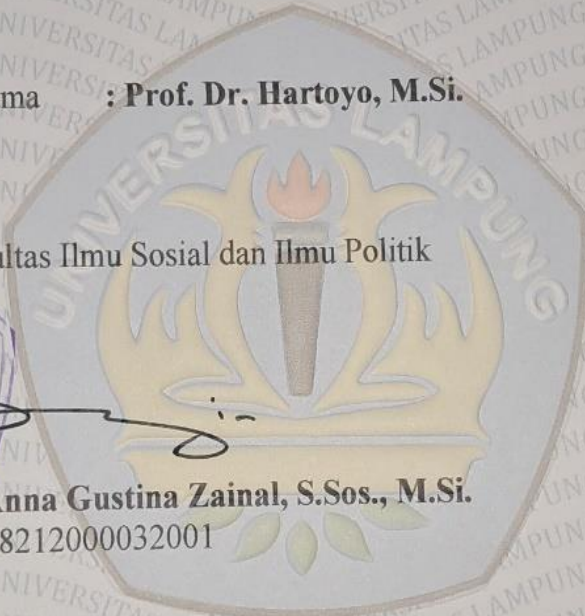
Ketua : **Dr. Handi Mulyaningsih, M.Si.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Hartoyo, M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.

NIP. 197608212000032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Januari 2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 15 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Emanuel Jalu Pandega

NPM 2016011049

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandarlampung, 23 Desember 2001, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari Bapak F.X Endro Kiswidodo dan Ibu Theresia Suranti.

Pendidikan yang pernah ditempuh.

1. TK Fransiskus 1 Tanjung Karang yang diselesaikan pada tahun 2008
2. SD Fransiskus 1 Tanjung Karang yang diselesaikan pada tahun 2014
3. SMP Xaverius 2 Bandarlampung yang diselesaikan pada tahun 2017
4. SMA Xaverius Bandarlampung yang diselesaikan pada tahun 2020

Pada tahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan organisasi dan berbagai kegiatan sukarelawan. Penulis menjadi Biro Sekretariat UKM Katolik Universitas Lampung tahun 2022 dan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat UKM Katolik Universitas Lampung. Penulis juga ikut dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Sosiologi sebagai anggota bidang

Kajian Intelektual periode 2022. Pada tahun 2023, penulis mengikuti program Magang Merdeka penempatan di Kementerian Dalam Negeri Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Jakarta Selatan dan masuk dalam Sub Direktorat Badan Permusyawaratan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa.

MOTTO

Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara kecil, ia juga tidak benar dalam perkara besar.

(Lukas 16:10)

In Nomine Jesu

(Julius Rijadi Kardinal Darmaatmaja, S.J)

If I Walk By Myself, I Know Im With Somebody I Can Trust

(Will Smith)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, skripsi ini penulis persembahkan kepada papah, mamah, adik dan teman-teman terkasih yang selalu memberikan berkat dan anugerah berupa dukungan serta kasih untuk mengantarkan penulis meraih gelar Sarjana Sosiologi

Kepada Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang luar biasa selama masa perkuliahan. Terkhusus kepada dosen pembimbing ibu Drs. Handi Mulyaningsih, M.Si. dan dosen penguji skripsi Bapak Prof. Dr. Hartoyo, M.Si. yang telah memberikan saran, masukan dan bimbingan selama proses penyelesaian skripsi ini.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, karena kasih dan anugerah-Nya skripsi ini dapat diselesaikan

Skripsi dengan judul **Pembangunan Desa: Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan FISIP Universitas Lampung
2. Ibu Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si. selaku Ketua Jurusan Sosiologi
3. Ibu Dr. Handi Mulyaningsih, M.Si selaku pembimbing utama atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam penyelesaian proses skripsi ini
4. Bapak Prof. Dr. Hartoyo, M.Si., selaku penguji utama pada ujian skripsi. Terima kasih banyak atas masukan, saran, dan kritikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Asnani, S.Sos, M.A selaku pembimbing utama terdahulu, terima kasih banyak atas segala masukan, bimbingan dan arahan baik terhadap skripsi ini maupun terhadap kehidupan penulis.

6. Staf Jurusan Sosiologi Universitas Lampung yang senantiasa membantu dalam hal administrasi sehingga proses penyelesaian skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
7. Saudara Gregorius Arya Daneswara selaku adik penulis, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih dan pengertiannya sebagai adik. Semoga saudara dapat bertumbuh lebih baik dan menjadi tuan atas diri sendiri dalam kehidupan kedepannya.
8. Seluruh Aparatur Desa Gantiwarno yang membantu memfasilitasi dan melancarkan kegiatan penelitian di Desa Gantiwarno, terima kasih banyak atas kesediaan dan masukan yang diberikan kepada penulis, semoga Desa Gantiwarno terus tumbuh dan berkembang menjadi desa maju
9. Teman-teman seperjuangan dalam YDDA Bima, Vanno, Victor, Ferdy, Toro, Bayu. Inka, Gita Cindy, Armed, Yohan, Elva, Septi, Resi Esti. Ucapan terima kasih banyak atas segala kepedulian, kasih dan pengertian sebagai sahabat seperjuangan skripsi ini. Semoga di kehidupan yang akan datang penulis dapat bertemu dengan versi terbaik dari kalian. .
10. Kepada Kepengurusan UKM Katolik Universitas Lampung tahun 2022 yang senantiasa memberikan dukungan, doa dan berkat bagi penulis sehingga penulis mampu menjadi pribadi yang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa.
11. Kepada Kepengurusan UKM Katolik Universitas Lampung Periode 2023 yang selalu mensupport penulis dalam perjalanan skripsi ini berlangsung. Semoga hal-hal baik yang telah kita lalui menjadi bekal kita untuk kehidupan kita kedepannya.

12. Kepada rekan-rekan Magang Merdeka Kemendagri dan Kemenhan yang bersamaan dengan penulis. Bima, Farida, Septi, Tian, Azzam, Ridha, Zio dan teman-teman lain yang belum sempat penulis ucapkan, terima kasih atas kesediaannya memberikan penulis ruang untuk berkembang menjadi pribadi yang mandiri, berani dan tegas dalam perantauan.
13. Kepada segenap teman-teman Sosiologi Angkatan 2020, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi teman seperjuangan dan memberikan ruang bagi penulis untuk berkembang dalam lingkup keluarga yang baru.
14. Kepada anggota Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Subdit Badan Permusyawaratan Desa Ibu Ida, Mas Ardi, Mas Akbar, Ibu Julia, Ibu Yayuk, dan anggota yang belum sempat penulis ucapkan, terima kasih atas bimbingan, pengetahuan, masukan, dan saran yang dapat penulis terima, semoga di lain waktu penulis dapat bertemu dan tali silaturahmi tidak terputus di kemudian hari.
15. Kepada teman seperbimbingan, yang selalu memberikan semangat dan berjuang dalam kebersamaan.
16. Kepada alumni, senior, teman, dan junior anggota UKM Katolik Universitas Lampung atas momen penting dan segala wejangan yang di berikan kepada penulis. Besar harapan penulis untuk tetap menjadi keluarga dimanapun penulis berada, menjadi bagian dalam Garam dan Terang untuk masyarakat.
17. Kepada tim sepak bola kesayangan, Arsenal F.C, yang menjadi bagian penting dalam hati penulis, semoga prinsip yang tertanam pada jiwa klub menjadi motivasi penulis untuk menjadi manusia yang senantiasa rendah

hati, sabar dan mendahulukan proses dalam setiap tujuan. Victoria Concordia Crescit.

18. Almamater terkasih, Universitas Lampung

19. Kepada diri sendiri, terima kasih telah berjuang, perjalanan tidak ada yang mudah, semoga setelah perjalanan skripsi ini selesai, akan ada perjalanan berikutnya yang banyak memberikan penulis pelajaran berharga dan menjadi pribadi yang humanis dan bijaksana.

Bandarlampung, Februari 2025

Penulis

Emanuel Jalu Pandega

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Badan Permusyawaratan Desa	13
2.1.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa.....	13
2.1.2 Tugas dan Fungsi BPD	14
2.2 Tinjauan Partisipasi Masyarakat	16
2.2.1 Definisi Partisipasi Masyarakat	16
2.2.2 Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat.....	16
2.2.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan.....	18
2.3 Tinjauan Pembangunan Desa	21
2.3.1 Pengertian Pembangunan Desa.....	21
2.3.2 Tahapan dalam Pembangunan Desa	22
2.4 Tinjauan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	23
2.5 Tinjauan Peran Badan Permusyawaratan Desa	23
2.5.1 Definisi Peran Badan Permusyawaratan Desa.....	23
2.6 Landasan Teori Peran Soerjono Soekanto	24
2.7 Penelitian Terdahulu	29
2.8 Kerangka Berpikir	33
III. METODE PENELITIAN	36
3.1 Jenis Penelitian	36
3.2 Lokasi Penelitian	37

3.3	Fokus Penelitian	37
3.4	Penentuan Informan	38
3.5	Sumber Data	39
3.6	Teknik Pengumpulan Data	41
3.7	Analisis Data	44
3.8	Keterbatasan Penelitian	45
IV.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
4.1	Karakteristik Masyarakat Desa Gantiwarno.....	47
4.1.1	Karakteristik Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Gantiwarno.....	47
4.1.2	Fasilitas Umum Desa Gantiwarno	48
4.1.2.1	Sarana dan Prasarana Desa Gantiwarno	48
4.2	Sejarah Desa Gantiwarno	51
4.3	Letak Geografis Desa Gantiwarno	52
4.4	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	54
4.4.1	Jumlah Penduduk	54
4.4.2	Riwayat Pendidikan Masyarakat Desa Gantiwarno.....	56
4.4.3	Mata Pencaharian.....	57
4.5	Visi dan Misi Desa	58
4.6	Struktur Pemerintahan Desa Gantiwarno	59
4.7	Struktur Badan Permusyawaratan Desa Gantiwarno.....	60
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN	62
5.1	Hasil Penelitian	62
5.1.1	Profil Informan	63
5.1.2	Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.....	63
5.1.2.1	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	65
5.1.2.2	Cara Aparatur Desa Membangun Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Musrenbangdes	65
5.1.2.3	Bentuk Partisipasi yang Diberikan Masyarakat dalam Musrenbangdes	67

5.1.2.4 Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes	68
5.1.3 Mekanisme Peningkatan Partisipasi Masyarakat.....	70
5.1.3.1 Hubungan Masyarakat dengan Aparatur Desa	72
5.1.3.2 Motivasi Masyarakat untuk Ikut Dalam Kegiatan Aparatur Desa	72
5.1.3.3 Kendala Dalam Mengikuti Kegiatan Aparatur Desa	73
5.2 Pembahasan.....	74
5.2.1 Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes: <i>Curiosity</i> Masyarakat dan Penolakan Aspirasi Masyarakat	74
5.2.2 Partisipasi Masyarakat: Konformitas Sosial dan Kecemburuan Sosial	82
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	91
6.1 Kesimpulan.....	91
6.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Penentuan Informan	39
Tabel 3.2 Sumber Data.....	41
Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	43
Tabel 3.4 Analisis Data	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	35
Gambar 4.1 Puskesmas Desa Gantiwarno	48
Gambar 4.2 Infrastruktur Jalan Desa Gantiwarno.....	49
Gambar 4.3 Infrastruktur Lapangan Voli Desa Gantiwarno	50
Gambar 4.4 Infrastruktur Pendidikan Desa Gantiwarno.....	51
Gambar 4.5 Peta Desa Gantiwarno	53
Gambar 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
Gambar 4.7 Struktur Pemerintahan Desa Gantiwarn	60
Gambar 4.8 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Gantiwarno.....	64

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan di Indonesia telah dibagi dalam dua bagian pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dengan berisikan tentang pembagian pemerintah di dalam pemerintah daerah yang terbagi menjadi pemerintah provinsi dan dalam pemerintah provinsi terbagi menjadi pemerintah kabupaten dan kota. Desa merupakan pemerintahan dengan bagian terkecil dalam pemerintahan daerah. Desa juga memiliki hak serta kewenangan dalam membangun serta mengembangkan wilayahnya sendiri yang disebut dengan otonomi desa. Desa sebelumnya diatur pada perundang undangan dengan merujuk pada UU No. 9 Tahun 2015, tetapi dalam pelaksanaannya hal ini menjadi penghambat bagi desa untuk berkembang karena kurangnya efektivitas pengambilan keputusan yang harus menunggu keputusan Peraturan Pemerintah di atasnya. Akibat dari kurangnya efektivitas pengambilan keputusan ini, lahirlah Undang Undang Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sehingga fokus desa tertuju pada perkembangan serta pengelolaan desa saja (Pamungkas, 2019).

UU No 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bagaimana desa dapat mengatur pemerintahannya sendiri dan dapat menjalankan hak serta kewenangannya dalam pemerintahan. Sebagaimana yang di jelaskan dalam UU No.6 Tahun 2014 bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuannya untuk memaksimalkan perwujudan kehidupan masyarakat yang sistematis dan progresif kearah yang lebih baik. Menurut Pamungkas (2019), adanya asas rekognisi dan subsidiaritas membuat desa dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri atas dasar kekuatan yang mencakup lingkungan lokal yang memperkuat status desa sebagai wilayah yang otonom.

Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah lembaga desa yang dibentuk secara bersama-sama masyarakat desa dan aparatur desa dengan maksud memberikan partisipasi utuh dalam pemerintahan desa demi berjalannya pengelolaan pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi salah satu elemen penting bagi pemerintahan desa dalam membangun desa. BPD muncul karena adanya otonomi yang diberikan oleh pemerintah dalam era reformasi sebagai bentuk pengembangan serta pembangunan desa dengan legislatif. Hal ini terjadi karena desa adalah wilayah yang memiliki beragam adat serta budaya yang berbeda-beda, maka BPD hadir sebagai lembaga yang memberikan jawaban bagi permasalahan desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, Badan Permusyawaratan Desa memiliki anggota yang di isi oleh masyarakat desa itu sendiri, dalam artian bahwa anggota BPD adalah keterwakilan dari setiap masyarakat desa (Dwinarko et al., 2021).

Fokus penelitian ini diarahkan kepada peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam membangun partisipatif masyarakat. BPD sebagai salah satu lembaga desa yang berwenang sebagai lembaga pengawasan pemerintahan desa dalam hal ini kepala desa yang menjadi subjek pengawasan kinerja serta penyalur aspirasi masyarakat desa. Kewenangan yang dimiliki oleh BPD ini adalah sebagai lembaga yang memastikan jalannya pemerintahan desa sebagaimana mustinya, sehingga sistem yang berjalan di pemerintahan desa dapat berjalan bersamaan dengan unsur unsur dari masyarakat serta pejabat tinggi desa (Soetrisno, 2021). Keharmonisan yang ditunjukkan baik dari masyarakat ke pemerintah desa maupun sebaliknya menjadi salah satu kekuatan yang mampu memberikan efek positif bagi keberlangsungan pembangunan desa. BPD sebagai lembaga desa mempunyai peranan kunci bagaimana terjadinya

keharmonisan antara masyarakat desa juga pemerintah desa dengan tugas pokok BPD yaitu sebagai wakil rakyat di desa (Subandi & Rahim, 2019).

Pembangunan yang berada di desa tidaklah jauh dari peranan masyarakat desa itu sendiri. Menurut Sutrisna (2021) partisipasi masyarakat merupakan elemen yang paling diutamakan dalam sebuah pelaksanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan menjadi sebuah poin penting karena terlibatnya masyarakat akan memudahkan rute serta tujuan dari pembangunan desa. Masyarakat akan menjadi penggerak dari pembangunan bukan hanya sebagai sebuah kumpulan masyarakat yang menerima hasil dari apa yang dikerjakan oleh segelintir orang dalam pembangunan saja. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa pembangunan wilayah dengan rancangan partisipasi masyarakat membangkitkan rasa solidaritas satu dengan yang lain yang dimana melibatkan banyak bagian lapisan masyarakat. Namun yang banyak terjadi khususnya di Desa Gantiwarno Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatra Selatan adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat desa untuk menyadari dampak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Perencanaan untuk membangun desa diperlukan adanya musyawarah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, kurangnya andil masyarakat desa untuk datang dalam perencanaan pembangunan desa membuat beberapa persoalan pembangunan yang dapat disuarakan memiliki kekurangan sehingga pembangunan desa tidak dapat berjalan dengan maksimal. Pembangunan yang berbasis partisipasi akan menimbulkan kekuatan masyarakat yang berdaulat sehingga mampu memanifestasikan tujuan dan cita-cita pembangunan nasional. BPD disini menjadi sebuah perpanjangan tangan dari masyarakat kepada pemerintah desa yang dimana partisipasi masyarakat sendiri di fasilitasi dan juga di berikan ruang untuk ikut membantu pembangunan desa bersama. Bentuk yang dilakukan oleh BPD sendiri adalah dengan membuat ruang musyawarah yang tujuannya untuk menampung aspirasi masyarakat desa yang diberikan lagi

keleluasaannya untuk dapat terlibat dalam masyarakat melalui UU No.6 Tahun 2014 (Handayani et al., 2023).

Musyawarah desa adalah forum bagi seluruh lapisan masyarakat desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa yang membahas mengenai rancangan progres keputusan desa yang sifatnya vital dan fundamental. Menurut Ridawati & Karo Karo (2023) musyawarah desa menjadi aspek penting pembangunan desa karena esensi nya yang efektif serta sangat bermanfaat bagi keberlangsungan pembangunan desa. Hal ini dikarenakan partisipasi dari masyarakat adalah tugas dari Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat desa, apabila penyampaian aspirasi ini tidak dilaksanakan maka esensi dari BPD ini tidak mewakilkan masyarakat desa. Faktanya banyak sekali anggota masyarakat yang tidak menanggagap adanya lembaga ini karena peran serta eksistensi nya di masyarakat tidak begitu besar. BPD yang menjadi salah satu wakil rakyat memiliki kewenangan khusus untuk bisa dekat dengan masyarakat, hal ini dapat dilihat dalam tugas serta kewenangan BPD yaitu mengumpulkan aspirasi masyarakat desa sehingga masalah dalam desa dapat dibenahi secara utuh serta dapat membangun pemecahan masalah melalui kebijakan yang akan dibuat dan di atur oleh pemerintah desa. Sehingga apabila masyarakat desa tidak melihat adanya peranan dari BPD ini sendiri maka yang akan terjadi adalah masyarakat desa tidak memiliki kepercayaan utuh terhadap pemerintahan desa dalam membangun desa kearah yang lebih baik. Masyarakat desa merupakan elemen penting bagaimana pembangunan desa terlaksana dengan baik melalui kegiatan pembangunan desa, baik itu dalam perencanaan hingga evaluasi pembangunan desa. BPD haruslah menjadi sebuah wadah bagi masyarakat desa untuk dapat menyampaikan hak serta pemikiran yang dapat membangun bagi desa. Wadah aspirasi bagi masyarakat desa ini tidak hanya untuk sebagai tempat penampungan saja, melainkan disalurkan ke pada pemerintah desa sehingga ada aksi yang terjadi dan hasil yang ditimbulkan dari buah pemikiran masyarakat desa.

Wadah ini diharapkan dapat menjadi sumber kepercayaan bagi masyarakat desa sehingga akan berdampak pada partisipasi masyarakat secara langsung (Rinto et al., 2021).

Fakta yang terjadi di desa adalah banyaknya BPD yang dalam menjalankan peran serta fungsinya mengalami banyak sekali kendala. BPD menjadi sebuah lembaga yang keberadaannya hampir tidak dianggap dan tidak berpengaruh besar pada masyarakat di desa (Miftah, 2020). Kendala yang sering dialami oleh BPD dalam melaksanakan fungsi serta tugasnya dalam pemeritahan adalah kurangnya kompetensi yang ada di dalam tubuh anggota BPD, kompetensi ini meliputi kurangnya pendidikan dasar mengenai tugas serta fungsi BPD, masalah pendidikan menjadi salah satu indikator penting banyaknya kendala yang terjadi dalam tubuh BPD ini sendiri yang mencapai tingkat perguruan tinggi. Hal ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan mengenai peran dari BPD terhadap masyarakat desa. Apabila BPD sulit dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga desa yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hal ini akan sulit dalam membangun serta mengelola pembangunan desa, kinerja BPD sendiri akan kurang efektif apabila dalam pelaksanaannya terdapat pihak-pihak yang tidak bekerja dalam kinerja yang terbaik sehingga terdapat peran BPD yang tidak berjalan dengan maksimal, hal ini tentu saja akan mengurangi tingkat kinerja dari anggota BPD (Nasrin, 2023). Dengan berbagai macam tugas dan fungsi dari BPD mengharuskan anggota dari BPD mempunyai tingkat kompetensi yang tinggi. Sedangkan tidak adanya modal khusus dari calon anggota BPD yaitu masyarakat desa dalam menjalankan serta memahami tugas dan peran dari Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini lah yang menjadi alasan bagaimana kurangnya efektifitas BPD, tugas dan peran yang begitu kompleks dengan tuntutan yang jelas banyak sedangkan modal yang dimiliki oleh masyarakat terhadap masyarakat desa mengenai tugas dan peran dari BPD sangatlah minim.

Kurangnya minat masyarakat desa dalam lingkup pembangunan desa melalui musyawarah menjadi salah satu faktor kurangnya partisipasi masyarakat yang ikut ambil bagian dalam setiap program pembangunan desa. Masyarakat desa

jarang sekali terlibat dalam suatu proses perencanaan pembangunan, sulitnya kesadaran dari masyarakat hingga faktor kepedulian masyarakat terkait pentingnya pembangunan desa dinilai menjadi salah satu faktor utama mengapa partisipasi masyarakat dinilai kurang maksimal dalam prosesnya (Samaun, 2022). Masyarakat yang menganggap bahwa partisipasi hanyalah sebagai formalitas sangat menentukan tingkatan partisipasi masyarakat di desa khususnya Desa Gantiwarno Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan sangat rendah (Handayani et al., 2023).

Rendahnya partisipasi masyarakat menjadi salah satu bentuk peran serta tugas dari BPD itu sendiri, bahwa antara kerja sama yang baik antara BPD dan masyarakat akan menghasilkan bentuk partisipasi yang baik. (Junior et al., 2021). Mengacu pada Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 110 Tahun 2016 Pasal 32 bahwa BPD mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengelola aspirasi masyarakat dan menyelenggarakan musyawarah desa membutuhkan adanya partisipasi masyarakat yang penuh untuk keberlangsungan peran BPD dalam pemerintahan desa. Keikutsertaan masyarakat dalam prosesnya menjadi salah satu bentuk aktif BPD dalam menjalankan tugas dan peran di ranah masyarakat serta pemerintahan desa. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 69 ayat 9 menyebutkan bahwa setiap rancangan pembangunan untuk pembangunan desa, wajib didiskusikan atau dimusyawarahkan dengan masyarakat. Pemerintah desa juga harus memperhatikan bagaimana perencanaan program pembangunan desa dapat didiskusikan bersama dengan masyarakat agar menghasilkan tujuan pembangunan yang jelas dan searah dengan visi misi desa.

BPD mempunyai banyak kendala dan kendala tersebut banyak membuat kurangnya kinerja BPD secara maksimal, tepatnya BPD Desa Gantiwarno Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan. Kurangnya pengetahuan mengenai tugas serta peran dari Badan Permusyawaratan Desa menjadi penghambat berjalannya sistem pemerintahan yang baik. Menurut Aziz (2020) menjelaskan bahwa pandangan agama pun melihat bahwa pendidikan merupakan salah satu

modal utama bagi masyarakat dalam melakukan banyak hal dalam kehidupan. Rentang pendidikan yang di anyam oleh BPD Desa Gantiwarno Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan terbilang cukup minim, banyak yang tidak melanjutkan sekolah sampai Perguruan Tinggi. Kurangnya sarana baik dalam pengaplikasian tugas BPD dalam melakukan pembangunan desa yaitu sebagai penampung serta penyalur aspirasi masyarakat membuat BPD kehilangan jati diri dalam pemerintahan desa. Hal ini pun sangat berpengaruh bagaimana BPD melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk melakukan musyawarah desa yang dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan sarana bagi masyarakat desa dapat membangun desa.

Faktor lainnya yang menjadi permasalahan dalam peran BPD guna membangun partisipasi masyarakat adalah tidak adanya pendekatan yang dilakukan dengan baik kepada masyarakat (Wahyudi & Setijaningrum, 2022). BPD yang menjadi lembaga desa yang perannya cukup tinggi dalam masyarakat desa seperti mempunyai gap yang terdapat dalam sistem masyarakat Desa Gantiwarno Kecamatan Belitang 3 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan. Adanya perbedaan status sosial ini akan memberikan kehidupan yang berbeda serta fasilitas yang berbeda pula, sehingga dalam kehidupan akan mempengaruhi kehidupan yang lainnya seperti kesempatan, standar hidup serta adanya kebebasan dalam bertingkah laku (Jailani, 2019). Akibat perbedaan gap ini membuat masyarakat desa Gantiwarno sulit dalam menjangkau pembangunan desa melalui sistem partisipatif. Permasalahan ini harus segera diatasi karena pentingnya partisipasi masyarakat untuk membangun desa. Partisipasi ini memerlukan adanya sistem yang jelas dari internal BPD sendiri untuk menarik minat masyarakat desa untuk aktif dalam musyawarah desa.

Efektifitas kinerja BPD menjadi bagian yang penting, dengan menjadikan semua tugas serta peran yang menjadi tanggung jawab dari BPD dapat terlaksana. Peran dan tugas yang terlaksana akan membuat masyarakat desa memahami kinerja yang ada dalam tubuh BPD sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat dapat menilai kinerja yang ada dalam BPD dapat

terlaksana dengan baik. Indikator efektivitas yang ada dalam BPD adalah salah satunya dengan mengajak masyarakat untuk turut ikut serta dalam proses pembangunan desa, sehingga masyarakat juga mempunyai rasa yang sama dalam membangun desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat yang tinggi menjadi tolak ukur bagaimana keefektifan BPD dapat dinilai dengan baik. Sehingga apabila tugas serta peran yang di emban oleh BPD dirasa sudah cukup baik maka partisipasi masyarakat dalam membangun desa akan dengan sendirinya muncul.

Penelitian yang dilakukan oleh Handayani et al. (2023) menjelaskan bagaimana peran BPD dalam pembangunan desa. Penelitian ini menjelaskan bagaimana BPD dengan peran perannya dalam masyarakat dikaji dengan pengamatan sesuai dengan data yang ada di lapangan. Penelitian ini mengedepankan berbagai macam peran yang di lakukan oleh BPD, mulai dari pengawasan, perencanaan dan pemosisian dalam masyarakat. Peran-peran ini dinilai kurang berjalan dengan baik karena berbagai macam hambatan yang ada dalam dinamika masyarakat. Hambatan yang ada berupa banyaknya anggota dari Badan Permusyawaratan Desa memiliki profesi yang beraneka ragam, sehingga sangat sulit dalam mengatur komunikasi serta mengatur pertemuan antara tiap-tiap anggota. Batasan yang terjadi diantara anggota membuat bagaimana BPD berjalan dengan kurang maksimal.

Dalam penelitian sebelumnya tidak dijelaskan bagaimana peran BPD dalam membangun partisipasi masyarakat. Sedangkan partisipasi dari masyarakat memerlukan perhatian khusus. Menurut Chotijah & Pratiwi (2019) terdapat manfaat yang terjalin apabila partisipasi dari masyarakat dapat terbangun dengan baik yaitu, partisipasi ini dapat menjadi sumber informasi dalam suatu permasalahan sehingga dapat memahami dengan pasti suatu permasalahan, tingkat efektivitas dari suatu program dapat berjalan dengan baik, dan partisipasi dari masyarakat mempunyai hak yang ada di masyarakat karena hal ini adalah salah satu bentuk dari sistem pemerintahan itu sendiri. Teori yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah dengan Teori Peran dimana teori tersebut menjadi patokan bagaimana penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini dilakukan karena kurangnya peran dari BPD untuk menjangkau masyarakat ikut serta dalam membangun desa, terlebih kurangnya sistem untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui musyawarah desa. Interaksi antar masyarakat yang cukup baik antar warga desa belum mampu membuat masyarakat desa Gantiwarno ikut terlibat dalam proses pembangunan desa. Penelitian ini ditujukan untuk mencari solusi, dengan melihat lebih dalam melalui fakta yang terjadi terkait kurangnya minat masyarakat desa dalam proses penyampaian aspirasi kepada BPD dalam proses pembangunan desa yaitu musyawarah desa khususnya di Desa Gantiwarno Kecamatan Belitang 3 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini juga menekankan pada peningkatan skema upaya peningkatan partisipasi pada masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Peran yang harus ada dalam tubuh lembaga BPD sejatinya dilihat dari bagaimana BPD sebagai lembaga desa mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan yaitu PERMENDAGRI No. 10 Tahun 2016. Pengoptimalisasian peran BPD dilakukan agar BPD dapat berjalan dengan baik. Hubungan komunikasi yang baik dengan sesama anggota BPD serta dengan Kepala Desa menjadi salah satu tonggak utama pemerintahan dapat berjalan dengan baik, apabila pemerintahan serta lembaga desa dapat berjalan dengan baik maka kepercayaan dari masyarakat akan tumbuh untuk saling memberikan masukan serta aspirasinya kepada pemerintah desa melalui partisipasi dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Sedangkan proses pembangunan desa melalui partisipasi masyarakat ini perlu dilaksanakan agar pembangunan dapat dimaksimalkan sehingga tidak ada masyarakat yang merasa bahwa pemerintah desa tidak memperhatikan masyarakat yang ada di desa. Melalui partisipasi masyarakat ini pemerintah desa dapat mengambil beberapa informasi yang menjadi sumber penting bagaimana peningkatan partisipasi masyarakat dalam lingkup desa dapat dimaksimalkan dengan baik. Pembangunan desa dalam pelaksanaannya terbagi menjadi tiga tahap, yang pertama ada tahap perencanaan, tahap

pelaksanaan serta tahap evaluasi, peran Badan Permusyawaratan Desa dalam membangun partisipasi masyarakat haruslah memasukan tiga komponen pembangunan desa. Partisipasi masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam tiga tahapan pembangunan desa, gunanya untuk mengajak masyarakat sebagai salah satu komponen yang juga mempunyai tanggung jawab sebagai aktor dalam membangun desa juga dapat bersinergi dengan baik dengan pemerintah desa sehingga tidak adanya kesalah pahaman yang terjadi baik dari pemerintah desa maupun dengan masyarakat desa itu sendiri

Partisipasi merupakan ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Partisipasi ini bersifat prakarsa dan juga swadaya. Prakarsa dalam partisipasi sendiri merupakan kemauan, hasrat juga kehendak sedangkan swadaya dari partisipasi tersebut merupakan kemampuan, kekeluargaan serta keharmonisan yang dalam pelaksanaannya diperlukan pengorganisasian agar dapat berjalan dengan baik (Herman, 2019). Partisipasi yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat desa khususnya Desa Gantiwarno III Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan ikut andil dalam penyampaian aspirasi.

Masyarakat desa dapat dengan leluasa menyampaikan aspirasinya dalam pembangunan desa baik itu dalam segi ekonomi, sosial budaya, maupun pengembangan teknologi yang ada di desa. Semakin banyak masyarakat desa yang turut memberikan aspirasinya dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, maka peran BPD untuk ikut membangun partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Tingkat efektifitas yang menjadi tolak ukur bagi BPD dalam menjalankan tugas nya menjadi aspek penting bagi jalannya roda pemerintahan yang baik. Komunikasi yang baik bersama dengan Kepala Desa menjadi salah satu faktor efektif tidaknya kinerja BPD dalam melaksanakan tugas, BPD mampu menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sehingga masyarakat serta BPD dapat bekerja sama dalam proses perencanaan pembangunan desa, serta pemahaman yang mendasar dari anggota BPD terkait tugas pokok serta fungsi

sehingga BPD dapat bekerja dengan memahami betul apa yang menjadi tugasnya dalam menjalankan roda pemerintahan desa.

Maka dari itu melihat latar belakang serta diperkuat oleh penelitian terdahulu maka peneliti mengambil judul “Pembangunan Desa: Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat (Studi Desa Gantiwarno Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan)”.

1.2 Rumusan Masalah

Melihat latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana cara BPD membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes?
2. Bagaimana mekanisme meningkatkan partisipasi masyarakat yang baik?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis memberikan tujuan penelitian sebagai berikut

1. Untuk mengetahui bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendekatan aparatur desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat.

1.4 Manfaat penelitian

a. Secara Teoritis

1. Bagi pihak Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Lampung, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah ilmu yang tidak serta merta hanya sebagai penelitian semata melainkan sebagai penelitian yang mengkaji sistem struktur masyarakat dari kelompok masyarakat satu dengan yang lain melalui interaksi yang terjadi di

Desa Gantiwarno Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

2. Bagi mahasiswa dan seluruh elemen dari pendidikan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah kajian yang berguna karena dalam masyarakat ataupun sebuah organisasi, partisipasi sangatlah di butuhkan baik untuk keperluan pembangunan ataupun keperluan organisasi sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menyadari betapa pentingnya partisipasi dari setiap masyarakat.
3. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran terkait bagaimana sistem dari pemerintahan juga perhatian dari masyarakat dapat menjadi suatu relasi yang baik sehingga tujuan serta cita cita bangsa dapat berjalan dengan baik.

b. Secara Praktis

1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sebuah penelitian ilmiah terkait topik penelitian dan juga pengalaman yang didapatkan lewat penelitian ini dapat menjadikan modal pembelajaran yang baik untuk kedepannya.
2. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangsih berupa pemahaman mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan juga bagaimana sistem dari BPD sendiri untuk memberikan perhatian lebih kepada masyarakat untuk membangun desa.
3. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini mampu memberikan acuan bagaimana sebuah lembaga dapat berjalan dengan maksimal sehingga tidak ada lagi permasalahan yang sama terlebih kurangnya efektivitas dari BPD terhadap masyarakat

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Badan Permusyawaratan Desa

2.1.1 Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Permendagri No. 110 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan keterwakilan dari tiap wilayah. Menurut Pasal 6 Permendagri No. 110 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tiap tiap keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan keterwakilan tiap wilayah dan juga berdasarkan keterwakilan perempuan. Dalam artian Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah lembaga desa yang memiliki kewenangan sebagai wakil dari masyarakat desa. Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Badan Permusyawaratan Desa merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat bersama kepala desa, BPD membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, BPD melakukan evaluasi kinerja kepala desa, hal ini menjadikan sebagai fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang dapat disimpulkan bahwa BPD memiliki kekuatan untuk menyetujui peraturan desa yang menjadi acuan untuk desa membangun pembangunan desa. BPD menjadi salah satu wakil dari masyarakat desa yang dapat mengatur jalannya pemerintahan desa (Faiza et al., 2020).

Badan Permusyawaratan Desa adalah sebuah partner bagi pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, sedangkan kedudukan dari BPD juga setara dengan pemerintah desa. Hal ini menjadikan acuan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik

tentulah adanya koneksi serta koordinasi yang baik antara BPD dan juga semua unsur pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa juga menjadi bentuk dari demokrasi yang ada di Indonesia dan di tujukan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik sesuai dengan adat serta budaya yang ada di dalam desa (Pohuwato, 2023). Dalam pelaksanaannya menjalankan fungsi dan peran dari Badan Permusyawaratan Desa, anggota yang menjadi bagian dari struktur BPD ini di atur menurut Peraturan Menteri yang berlaku.

Menurut Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa menetapkan bahwa jumlah anggota yang masuk kedalam anggota BPD adalah paling sedikit lima orang dan paling banyak adalah sembilan orang, dan penetapan dari setiap anggota yang ada di BPD adalah setiap orang yang berasal dari wilayah masing masing yang ada di dalam desa, seperti RT, RW atau wilayah dusun. Serta dalam keanggotaannya BPD juga di isi dengan anggota yang mewakili dari wakil kumpulan perempuan yang ada di dalam desa tersebut. Hal ini dilakukan agar adanya kesetaraan yang adil dalam kubu lembaga desa yang mewakili dari masyarakat desa.

2.1.2 Tugas dan Fungsi BPD

Badan Permusyawaratan Rakyat mempunyai tugas serta fungsinya dalam pemerintahan desa sebagaimana bahwa BPD merupakan perwakilan tangan masyarakat desa. Tugas serta fungsi dari BPD tersebut sudah diatur dalam Peraturan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 31 dan Pasal 32 No. 110 Tahun 2016.

Pasal 31:

BPD mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 32:

BPD mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melihat tugas dan fungsi BPD yang terdapat dalam pengelolaan serta penyaluran aspirasi masyarakat, BPD membutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi yang dapat diberikan oleh masyarakat berupa penyampaian aspirasi dari masyarakat. Apabila tidak adanya partisipasi berupa penyampaian aspirasi dari masyarakat, maka tugas dari BPD belum dapat terlaksana secara keseluruhan, maka dari itu diperlukannya aspirasi dari masyarakat untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi dari BPD.

2.2 Tinjauan Partisipasi Masyarakat

2.2.1 Definisi Partisipasi Masyarakat

Menurut Sarinah et al. (2021) partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat secara sukarela ke arah perubahan yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Partisipasi yang diartikan menurut Mikklesen ini dapat juga dimaknai sebagai keikutsertaan sekelompok individu dalam proses pembangunan baik dari segi lingkungan, kehidupan serta kehidupan masyarakat. Menurut M.J. Herskovits dalam Abdulsyani (2018) Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang diorganisasikan dan ikut pada satu cara hidup tertentu. Menurut Herman (2019) Partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, dan memainkan peran penting dalam penyusunan dan pelaksanaan program. Ini juga merupakan bukti kesediaan dan keinginan masyarakat untuk berkontribusi dan berkorban untuk mencapai pembangunan. Menurut Sarinah et al. (2021) Partisipasi masyarakat adalah proses dimana masyarakat turut terlibat dalam pengidentifikasian masalah yang ada dalam masyarakat.

Menurut Nasrin et al. (2023) partisipasi masyarakat merupakan proses aktif masyarakat dalam melakukan tindakan yang dipandu oleh pemikiran masyarakat itu sendiri dengan menggunakan metode serta prosedur yang bertujuan memiliki kontrol yang efektif. Didasari dengan inisiasi yang muncul dari masyarakat itu sendiri, masyarakat mampu memberikan partisipasinya secara efektif dengan menggunakan sistem baik itu lembaga ataupun mekanisme yang telah diberikan kepada masyarakat. Menurut Nasrin et al. (2023) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan dalam suatu proses kegiatan.

2.2.2 Bentuk dan Jenis Partisipasi Masyarakat

Merujuk Pasha et al. (2022) bentuk partisipasi masyarakat dibagi menjadi tiga bentuk di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi pikiran, partisipasi yang berupa ide juga gagasan yang sifatnya membangun, baik dalam pembuatan program kerja maupun dalam pelaksanaannya. BPD selaku pemerintah desa memfasilitasi adanya musyawarah pembangunan desa memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut ikut memberikan buah pikirannya terhadap pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
2. Partisipasi tenaga, partisipasi yang bersifat mengerahkan daya tenaga manusia untuk menunjang kelancaran serta kesuksesan dari suatu program yang diadakan. Masyarakat dalam artian ini membantu dalam proses pembangunan melalui program baik itu segi pembangunan infrastruktur ataupun pembangunan yang sifatnya ada dalam diri manusia itu.
3. Partisipasi materi, partisipasi ini diartikan sebagai partisipasi yang berbetuk sebagai sumbangan berupa barang, baik yang berharga maupun yang memiliki sifat berpengaruh dalam kelancaran suatu program tersebut.

Menurut Latunussa et al. (2022) menjelaskan jenis-jenis partisipasi yang ada dalam masyarakat sebagai berikut:

1. Pikiran, adalah jenis keterlibatan masyarakat dalam kegiatan dengan mengerahkan ide dan pikiran untuk tujuan tertentu.
2. Tenaga, adalah jenis partisipasi pada individu maupun kelompok yang memberikan tenaga dengan keterlibatannya dalam kegiatan yang mempunyai maksud serta tujuan tertentu.
3. Pikiran dan Tenaga, adalah partisipasi yang lebih kompleks dengan menggabungkan dua jenis partisipasi fisik dan non-fisik secara bersamaan.
4. Keahlian, adalah jenis partisipasi dari individu maupun kelompok yang memiliki keahlian tertentu baik formal maupun non-formal dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan.

5. Barang, adalah partisipasi yang berasal dari sekelompok individu maupun individu yang memberikan suatu barang untuk menunjang suatu program kegiatan.
6. Uang, adalah jenis partisipasi yang diberikan melalui dana bagi keberlangsungan suatu program yang sedang dijalankan.

2.2.3 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Menurut Radi (2020) menyatakan bahwa ada tiga alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.

1. Partisipasi masyarakat merupakan sebuah alat untuk memperoleh sumber-sumber informasi mengenai kebutuhan, permasalahan serta sikap dari masyarakat.
2. Masyarakat dapat mempercayai program yang akan dilaksanakan ketika masyarakat ikut terlibat dalam detail program.
3. Masyarakat akan memiliki pandangan bahwa sistem demokrasi serta kepentingan hak dan kewajiban sebagai warga negara terpenuhi apabila masyarakat turut ambil bagian dalam proses pembangunan.

Menurut Wastuti et al. (2021), faktor yang menjadi pendukung serta penghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu:

Faktor pendukung:

1. Kesempatan
Faktor pendukung ini adalah dimana masyarakat mengetahui bahwa ia memiliki peluang untuk ikut dalam pembangunan. Wadah tersebut dibuat oleh adanya peran dari pemerintah dengan pelibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan.
2. Kemauan
Faktor pendukung ini adalah faktor dimana masyarakat memiliki suatu dorongan atau motivasi untuk ikut terlibat dalam partisipasi,

dorongan tersebut dapat berupa hasil atau *reward* setelah ikut ambil bagian dalam proses pembangunan.

3. Kemampuan

Faktor pendorong ini adalah kemampuan untuk menganalisis kesempatan untuk membangun pengetahuan sehingga mutu dalam hidupnya dapat lebih bermutu. Kemampuan merupakan kapasitas individu dalam mengerjakan berbagai hal yang termasuk dalam tugasnya atau pekerjaannya.

Faktor Penghambat:

1. Sifat Individu

Menurut Dwiningrum (2018) Sifat individu yang dimiliki oleh masyarakat karena adanya rasa malas, apatis dan tidak peduli terhadap pembangunan atau proses pembangunan yang sedang berjalan.

2. Demografis

Faktor usia menjadi salah satu penghambat partisipasi masyarakat, banyak nya masyarakat yang berada diatas umur produktif sangat rentan untuk tidak mengikuti pembangunan daerah dikarenakan faktor kesehatan maka lebih kepada usulan, dan masyarakat yang berada dalam usia produktif lebih pada pelaksanaan program.

3. Ekonomi

Masyarakat cenderung lebih mementingkan pekerjaan mereka ketimbang harus melaksanakan program yang sifatnmya tidak memberikan dampak finansial pada sebagian besar masyarakat.

2.2.4. Upaya Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Menurut Affan (2021) upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dibagi dalam empat bagian. Upaya ini dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakat, yaitu

1. Adanya penyampaian berupa informasi tentang suatu penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kepada masyarakat
2. Mendukung suatu kelompok masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dengan pembangunan kapasitas
3. Mengembangkan mekanisme pengambilan suatu keputusan yang dapat memungkinkan suatu kelompok dapat berperan secara aktif
4. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menurut Ayu et al. (2024) upaya pembangunan partisipasi masyarakat yang dilakukan pemerintah desa dilakukan dengan membina masyarakat desa mengenai pentingnya proses pengambilan keputusan, kebijakan dan usulan yang ada dalam kegiatan musyawarah desa. Pelibatan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan menjadi upaya pemerintah desa membangun partisipasi masyarakat.

Menurut Maji et al. (2024) upaya peningkatan partisipasi masyarakat meliputi beberapa hal, yaitu,

1. Adanya akses informasi mengenai suatu kegiatan dengan mudah. Akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat dapat memudahkan masyarakat untuk mengetahui lebih detail suatu kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Kesadaran akan pentingnya partisipasi. Pemerintah dapat mengundang masyarakat untuk ikut terlibat dalam kegiatan yang akan dilaksanakan baik undangan surat maupun media lain dan meminta masyarakat ikut berkomitmen terhadap partisipasinya
3. Optimalisasi kelompok masyarakat. Pemerintah dapat mengoptimalkan semua lembaga masyarakat yang ada di desa untuk ikut membantu pembangunan partisipasi yang ada di masyarakat.

2.3 Tinjauan Pembangunan Desa

2.3.1 Pengertian Pembangunan Desa

Menurut Rukayat et al. (2020), Pembangunan merupakan proses suatu daerah dalam melakukan perubahan yang dianggap perubahan tersebut mengalami kemajuan. Proses yang dilakukan oleh suatu daerah tersebut akan bermacam-macam dan bervariasi namun tetap akan menuju kearah positif dan memajukan daerah tersebut.

Menurut Siagian (2008) pembangunan adalah suatu upaya yang direncanakan and dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, atau pemerintah untuk menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation Building) sedangkan Rukayat (2020) memberikan pengertian pembangunan secara sederhana yaitu suatu proses perbaikan melalui upaya yang direncanakan.

Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 adalah “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Dengan begitu dapat dijelaskan bahwa desa adalah komunitas self-governing. Posisi desa dengan otonomi asli sangat strategis karena fakta bahwa mereka memiliki otoritas untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi sosial budaya lokal (Endah, 2018).

Menurut Rizal et al. (2022) Pembangunan Desa adalah bentuk suatu pencapaian guna peningkatan pertumbuhan kesejahteraan serta hidup masyarakat yang dilaksanakan secara terus menerus. Sedangkan pengertian pembangunan desa menurut Guampe et al. (2022) adalah salah satu bentuk pembangunan yang lebih inklusif. Proses yang mendorong inovasi dan memungkinkan sinkronisasi antar aktor dan sektor diperlukan untuk

pembangunan desa. Perjuangan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu dikenal sebagai pembangunan desa.

Menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1 dijelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan menurunkan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

2.3.2 Tahapan dalam Pembangunan Desa

Menurut Guampe et al. (2022) pembangunan desa ini terdiri atas beberapa tahapan agar pembangunan di suatu wilayah khususnya di desa tersistem dan dapat ter-monitor dengan baik. Tahapan ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu:

1. Perencanaan

Menurut Herman (2019) Perencanaan pembangunan adalah upaya yang sistematis dari berbagai pihak, baik pemerintah swasta maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda, untuk mengatasi ketergantungan dan hubungan antara komponen fisik.

2. Pelaksanaan

Menurut Nisoh (2019) Pelaksanaan adalah suatu proses menggerakkan masyarakat untuk melakukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sehingga proses menjadi lebih efisien dan hasilnya lebih baik. Masyarakat dapat dimotivasi oleh fungsi ini untuk berusaha keras untuk mencapai tujuan perusahaan atau organisasi.

3. Evaluasi

Menurut Ajawaila et al. (2021) evaluasi adalah sebagai kebijakan sebagai suatu usaha yang bertujuan untuk menilai keberhasilan berbagai program pemerintah secara menyeluruh berdasarkan spesifikasi obyek, metode pengukuran, dan teknik analisis.

Tahapan-tahapan dalam pembangunan desa ini menjadi salah satu pedoman agar pembangunan di desa dapat berjalan dengan baik dan tidak keluar jalur pembangunan yang akan dan sudah ditetapkan. Tahapan yang ada dalam penelitian ini menggunakan tahapan yang lebih berfokus kepada perencanaan. Tahapan perencanaan menjadi fokus karena penelitian ini mengambil fokus kepada BPD yang bertugas pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

2.4 Tinjauan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

Menurut Setiawan (2023) musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan suatu forum yang berfungsi sebagai wadah untuk membangun desa. Forum ini merupakan wadah bagi pembangunan yang mempunyai sifat partisipatif dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa harus memiliki daya diskusi, fungsinya untuk mendapatkan keputusan terbaik mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah dengan andil masyarakat.

Menurut Rustam et al. (2023) menjelaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa merupakan wadah musyawarah tahunan yang berfungsi untuk menyetujui rencana kerja pembangunan desa pada tahun anggaran yang telah ditetapkan. Musrenbangdes merupakan forum musyawarah untuk pengambilan keputusan yang dilakukan bersama sesuai dengan prinsip prioritas.

2.5 Tinjauan Peran Badan Permusyawaratan Desa

2.5.1 Definisi Peran Badan Permusyawaratan Desa

Menurut Rusdia & Wirawan (2020) Peran yang dimiliki oleh BPD sifatnya strategis. BPD menjadi fasilitator yang dimiliki masyarakat untuk memberikan aspirasinya kepada pemerintah daerah, maka dari itu hubungan yang baik antara Kepala Desa dengan BPD haruslah berlangsung dengan

baik, hal ini menjadi salah satu syarat penting bagaimana pembangunan desa dapat berjalan dengan baik.

BPD mempunyai bentuk pelaksanaan perannya secara transparansi atau secara terbuka kepada masyarakat desa. Bentuk keterbukaan tersebut adalah adanya musyawarah, musyawarah dinilai menjadi salah satu bentuk keterbukaan karena hasilnya yang menghasilkan mufakat (Rusdia & Wirawan, 2020).

2.7 Landasan Teori Peran Soerjono Soekanto

Peran menurut Soekanto merupakan aspek dinamis dari status atau kedudukan, apabila suatu masyarakat melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan statusnya dimasyarakat, maka dia menjalankan suatu peranan. Peran dapat meliputi norma-norma yang berlaku sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Peran juga merupakan konsep mengenai perilaku sebagai individu sebagai masyarakat dalam organisasi. Perilaku yang hadir sebagai individu harus sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Semakin tinggi status dan kedudukan masyarakat dalam suatu struktur sosial maka akan semakin tinggi kewajiban serta hak yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut (Soekanto, 2013).

Peran menurut Susi Iswanti & Zulkarnaini (2022) yaitu segala perilaku yang diharapkan dilakukan oleh seseorang yang memiliki status tertentu dimasyarakat. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku yang seharusnya dilakukan oleh seseorang yang muncul karena jabatan tertentu. Semakin tinggi jabatan yang dimiliki oleh suatu individu, maka akan semakin tinggi juga pengaruh perilaku yang diharapkan oleh individu tersebut. Peran masyarakat dapat dilihat dari bagaimana masyarakat juga melaksanakan hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut dalam berpartisipasi kegiatan, sedangkan hak mereka adalah untuk menerima manfaat dari adanya pembangunan yang ada di desa.

Peran menurut Rahman (2020) adalah penekanan sifat individu sebagai pelaku dalam sosial yang berkuat dengan perilaku berdasarkan posisinya di lingkungan masyarakat. Kahn menjelaskan peran sebagai suatu konsep yang ada di dalam masyarakat dengan individu sebagai pelaku sosial yang belajar dengan posisi pelaku di lingkungan masyarakat. Sedangkan menurut Vardiansyah (2018) peran adalah suatu tindakan perilaku yang diharapkan terkait dengan posisi sosial. Peran yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah dengan mengaitkan individu dalam suatu proses perubahan masyarakat dengan status sosial yang dimilikinya. Hakikatnya, teori ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang dapat memprediksi bagaimana mereka berperilaku dan bahwa konteks tertentu, yang dibangun berdasarkan posisi sosial dan elemen lain membentuk perilaku individu.

Peran merupakan bentuk hak dan kewajiban yang dimiliki oleh individu maupun organisasi sesuai dengan status sosial yang ada dalam masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa memiliki status sosial yang lebih tinggi dan mempunyai kewajiban dalam membentuk partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan pembangunan desa. Teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ini mencakup tugas dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam membangun partisipasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tanggung jawab sebagai aparatur desa membangun partisipasi masyarakat untuk ikut melaksanakan pembangunan desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi salah satu kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam membangun partisipasi masyarakat agar ikut terlibat.

Konsep peran menurut Soerjono Soekanto masih memiliki kekurangan khususnya dalam penelitian ini. Hak dan kewajiban yang merupakan konsep dasar individu melaksanakan peran belum dapat menyeluruh. Perilaku hak dan kewajiban belum mampu diterapkan dalam situasi dan kondisi tertentu yang mewajibkan seorang individu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai unsur dalam melaksanakan peran.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil dan Kesimpulan
1.	Yusrina Handayani, 2021	Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Pada Proses Pelaksanaan Pembangunan	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan berbagai macam indicator. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara. Penelitian ini menjabarkan bahwa peran BPD dapat berjalan dengan baik dilihat dari bagaimana koordinasi dengan pemerintrah desa. Tingkatan partisipasi masyarakat bertambah karena kekuasaan penuh desa dalam mengatur urusan pembangunan desa itu sendiri. Penekanan dalam penelitian ini di khususkan pada segi BPD mengambil peran dalam masyarakat menyampaikan aspirasinya. Aspirasi masyarakat ini dapat berjalan karena adanya perkembangan peraturan yang mengkhususkan desa dapat menjalankan pemerintahannya sendiri. Koordinasi yang kuat terhadap elemen masyarakat, BPD dan juga Kepala Desa membuat penyaringan aspirasi masyarakat desa lebih dikoordinir menjadi aspirasi yang membangun desa tersebut. Partisipasi masyarakat pada penyampaian aspirasi terkait APBD serta perencanaan pembangunan lainnya dapat terlaksana dengan baik sehingga peran BPD terlihat dalam bentuk aktivitas serta fungsi dan juga tugas yang terlihat jelas dalam masyarakat, yang berarti transparansi dari sistem BPD serta Pemerintahan Desa berjalan dengan baik.</p>

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil dan Kesimpulan
2.	Sofian Malik, 2020	Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<p>Penelitian ini membahas bagaimana peran BPD dalam terselenggarakannya pemerintahan yang ada di desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif basic research yang melihat dari berbagai macam sumber referensi sebagai salah satu acuan dalam melihat permasalahan BPD di lapangan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana peran BPD dalam pemerintahan desa dan menjelaskan bagaimana BPD menjadi Lembaga Desa yang mempunyai tanggung jawab serta hak sebagai wakil dari masyarakat dalam mengutarakan aspirasinya, serta apa saja yang menjadi factor penghambat BPD dalam melaksanakan tugasnya di dalam pemerintahan desa. Penelitian ini memberikan hasil pada bagaimana BPD bekerja dalam pemerintahan desa, peran nya yang sangat besar dalam pemerintahan tidak dijalankan dengan semestinya, dikarenakan kurangnya pengetahuan akan tugas serta fungsi yang ada dalam BPD itu sendiri. Pendidikan menjadi hal utama mengapa sumber daya manusia yang ada dalam BPD tidak berjalan dengan baik. Selain itu penelitian ini juga melihat dari segi anggaran operasional yang diberikan tidak mampu menutupi semua kegiatan yang ada, sarana dan prasarana yang tidak memadai juga menjadi masalah yang ada di dalam lingkungan kerja BPD membuat kurang maksimalnya BPD dalam masyarakat dan Pemerintahan Desa.</p>
3.	Irman Puansah, Ali Sahbana Effan Zulfiqar, Darmansyah Pulungan, Ismi	Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Sipapaga Kecamatan Penyabungan	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif-analitis agar penelitian dapat cermat dalam pengukuran fenomena sosial. Penelitian ini difokuskan dalam melihat peran dari BPD terhadap fungsi dan tugasnya dalam masyarakat. Penelitian ini melihat bahwa BPD dalam aktivitasnya</p>

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil dan Kesimpulan
Alwi 2022	Nasution,		sebagai lembaga desa belum maksimal dalam menjalankan wewenangnya dalam pemerintahan desa. Peranan BPD sangat minim melihat kurangnya keaktifan BPD dalam melaksanakan musyawarah, sehingga penampungan serta penyaluran aspirasi dari masyarakat tidak berjalan dengan baik. Dalam penelitian ini dijelaskan bagaimana factor penghambat yang menyebabkan kurangnya peranan BPD dalam melakukan tugas serta wewenangnya sebagai perpanjangan tangan masyarakat desa, yaitu dengan kurangnya sumber daya manusia yang memahami pokok tugas fungsi BPD dan koordinasi serta transparansi dari BPD dan Kepala Desa menambah kekurangan dari pembangunan desa baik dari segi perencanaan pembangunan desa dan juga pelaksanaannya.

Perbedaan serta pembaharuan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah aspek terkait fokus peran dari BPD itu sendiri. Dalam penelitian yang diteliti oleh Sofyan Malik, penelitian tersebut mengambil fokus peranan BPD dalam pemerintahan desa. BPD selaku lembaga desa mempunyai peranan besar untuk menjalankan fungsinya dalam pemerintahan desa yaitu dengan menjadi wakil dari masyarakat desa itu sendiri. Peneliti meneliti terkait faktor yang menjadi penghambat bagaimana BPD tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah fokusnya, penelitian ini mengambil fokus terkait bagaimana interaksi BPD dengan masyarakat desa terkait sehingga menghasilkan suatu hasil berupa tugas dan wewenang dari BPD sendiri sebagai wakil masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasinya. Sedangkan dalam penelitian Irman Puousah mengambil fokus pada apa yang menjadi penyebab BPD tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik di dalam masyarakat. Fokus pada tiga penelitian diatas adalah dalam peran BPD ini dalam kondisi tugas dan fungsi yang menyeluruh dengan pembangunan desa. Penelitian ini mengambil fokus pada tugas dan wewenang BPD sebagai lembaga desa yang menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat desa kedalam tugas pembangunan desa.

Lokasi yang diteliti pada penelitian di atas juga memiliki perbedaan, pada penelitian ini berlokasi di Desa Gantiwarno, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti memilih lokasi ini karena lokasi yang diteliti memiliki keunikan tersendiri, wilayah yang mayoritas suku Jawa di dalam wilayah Sumatera Selatan dengan interaksi yang baik antar warga desa namun belum memiliki kesadaran untuk ikut membangun desa melalui aspirasi-aspirasi yang disampaikan pada BPD. Penelitian diatas lebih menjelaskan bagaimana BPD kurang berperan untuk menjalankan tugasnya dalam membangun desa sedangkan penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana peran BPD dalam membangun partisipasi masyarakat untuk ikut tergabung dalam perencanaan pembangunan demi pembangunan desa yang lebih baik. Dengan melihat bagaimana pola interaksi yang terjalin dengan masyarakat serta

melihat lebih jauh bagaimana sistem BPD membangun partisipasinya dalam masyarakat serta fungsi struktur keanggotaan yang ada dalam tubuh BPD.

Keunggulan yang ada dalam penelitian ini adalah menyajikan sebuah skema upaya peningkatan partisipasi masyarakat oleh Badan Permusyawaratan Desa sehingga peran serta tugas dari Badan Permusyawaratan Desa dapat menjadi tolak ukur untuk mengukur efektivitas peran serta tugas nya dalam masyarakat dan bagi pemerintah desa.

2.8 Kerangka Berpikir

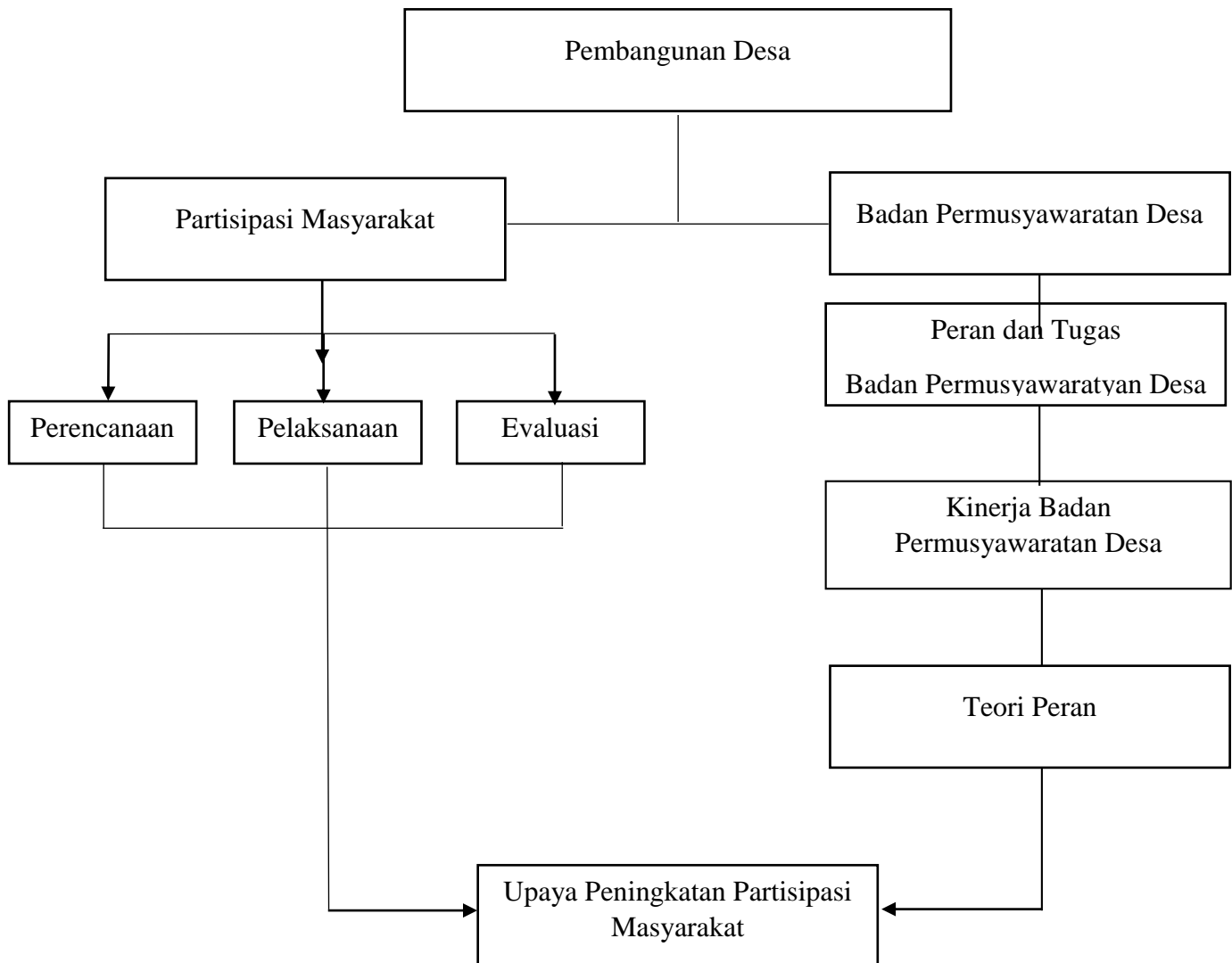
Desa sejatinya adalah tempat administratif yang mengedepankan kepentingan umum dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunannya. Andilnya masyarakat dalam pembangunan ini yang menjadi tonggak utama jalannya demokrasi di bagian struktur pemerintahan terkecil yaitu desa. Namun, dalam menunjang hal tersebut tidak semua mampu melaksanakannya dengan baik, dan tidak semua masyarakat dapat meraih kesempatan tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga pemerintahan desa yang memfasilitasi masyarakat untuk dapat membangun desanya melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa sungguh harus berperan aktif dalam menjamah masyarakat. Tujuannya agar pembangunan desa serta sistem pemerintahan di desa melalui transparansi yang dibangun antara BPD, Kepala Desa dan masyarakat desa dapat berjalan dengan transparan dan sehat.

Desa Gantiwarno merupakan desa yang memiliki keragaman masyarakat. Keragaman masyarakat ini dinilai menjadi nilai *plus* bagi peneliti dalam proses pembangunan desa, karena dengan begitu masyarakat di Desa Gantiwarno memiliki keragaman pikiran terkait pembangunan di Desa Gantiwarno sehingga dapat ikut terlibat dalam merumuskan berbagai macam perencanaan pembangunan. Namun tetap menjadi perhatian bagaimana BPD dapat memanfaatkan hal tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan mereka di dalam pemerintahan desa.

Fenomena ini akan di analisis dengan menggunakan teori peran oleh Soerjono Soekanto yang mengemukakan bahwa peran adalah pelaksanaan hak serta kewajiban dari kelompok masyarakat yang memiliki status sosial dalam masyarakat.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk lebih memahami data yang ada berdasarkan fakta di lapangan. Peneliti dapat memahami permasalahan yang menjadi sumber utama masalah dengan interaksi dan komunikasi. Sehingga dalam proses pengambilan data, peneliti mendapatkan hasil yang valid. Maka dari itu peneliti mencoba mengambil data dengan terjun langsung ke lapangan dan melihat secara langsung bagaimana fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian dengan metode ini jelas memerlukan sumber berupa subjek, maka dari itu penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara sebagai penunjang agar data penelitian semakin valid, dengan persepsi juga interpretasi sebagai makna data yang akan di ambil. Observasi secara langsung juga diperlukan agar memahami secara pasti lingkungan yang ada dan menjadi objek dari data yang akan diambil (Firmansyah et al., 2021).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berbasis pada filsafat postpositivisme digunakan untuk mempelajari kondisi obyek yang alami. dengan begitu penelitian ini berfokus pada kualitas data yang disajikan

Penelitian dengan metode kualitatif dipilih oleh peneliti karena sesuai dengan yang menjadi fokus dari peneliti, yaitu dengan menyajikan data yang nyata sesuai dengan fenomena sosial yang ada di lapangan serta interpretasi dari sumber data dengan melalui wawancara. Sehingga tergambar dengan jelas apa yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gantiwaro dalam membangun partisipasi masyarakat untuk turut membangun desa. Dengan begitu maka penelitian ini juga

menggunakan teori yang berasal dari Soerjono Soekanto, yaitu teori peran, dengan meninjau peran BPD dalam membangun partisipasi masyarakat.

3.2 Lokasi Penelitian

Desa Gantiwarno, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan adalah desa yang menjadi lokasi penelitian yang akan diambil oleh peneliti. Desa Gantiwarno memiliki keberagaman sosial yang memadai, mulai dari kepercayaan, rentang usia serta mata pencaharian yang terbilang cukup beragam. Desa dengan luas kondisi ini memungkinkan peneliti mengambil lokasi penelitian di desa Gantiwarno dikarenakan keberagaman yang ada membuat kepentingan pembangunan serta kebutuhan pembangunan masyarakat akan beragam. Luas desa Gantiwarno adalah 186,193 ha, sedangkan desa Gantiwarno berada pada ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Dengan begitu sebagian besar pekerjaan yang menjadi mata pencaharian masyarakat desa Gantiwarno lebih banyak pada sektor pertanian.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini mengambil fokus pada upaya BPD membangun partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan Musrenbangdes. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tanggung jawab terhadap aspirasi masyarakat untuk pembangunan desa, pengelolaan aspirasi ini juga merupakan tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa. Pengumpulan dan pengelolaan aspirasi oleh BPD membutuhkan adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat yang dimaksudkan dalam penelitian ini berupa partisipasi dalam memberikan aspirasi serta bentuk kehadiran masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes. Bentuk penyampaian aspirasi disampaikan dalam kegiatan Musrenbangdes berlangsung, bentuk aspirasi ini juga menyampaikan setuju dan/atau tidaknya masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan. Pembangunan partisipasi dalam bentuk kehadiran difokuskan pada BPD mengundang

masyarakat perwakilan setiap dusun yang ada dalam Desa Gantiwarno. Peran BPD dalam peningkatan partisipasi ini berupa peran sebagai penggerak sosial. BPD yang mempunyai status lebih tinggi daripada masyarakat umum memiliki peran penggerak sosial untuk masyarakat. Masyarakat memiliki wadah khusus dalam memberikan aspirasinya untuk pembangunan desa, wadah tersebut berupa kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes menjadi wadah penting bagi seluruh lapisan masyarakat memberikan saran serta aspirasinya untuk membangun desa. Kegiatan Musrenbangdes akan menghasilkan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berfungsi sebagai pedoman desa dalam melakukan pembangunan. BPD merupakan lembaga pemerintahan desa yang menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah desa, BPD juga merupakan lembaga wakil masyarakat. Upaya membangun partisipasi masyarakat ini memerlukan cara agar masyarakat dapat ikut memberikan partisipasi dengan upaya BPD membangun pola hubungan dengan masyarakat serta cara BPD mengajak masyarakat untuk ikut dalam kegiatan Musrenbangdes.

3.4 Penentuan Informan

Penelitian kualitatif selalu berhubungan erat dengan informan. Informan menjadi kunci penting bagi peneliti agar mendapatkan sumber yang menjadi data dalam melakukan penelitian dengan wawancara sebagai salah satu bentuk pengambilan data dari informan. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan informan. Informan ditentukan sesuai dengan tujuan dan kriteria yang ada dalam penelitian ini. Penelitian ini diperlukan beberapa informan yang akan diwawancarai, diantaranya yaitu: Kepala Desa Gantiwarno, Kepala BPD Desa Gantiwarno, Anggota BPD Desa Gantiwarno dan 3 masyarakat umum Desa Gantiwarno.

Tabel 3.1 Penentuan Informan

No.	Tujuan Penelitian	Informan
1.	Untuk mengetahui bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes	1. Kepala BPD Desa Gantiwarno 2. Kepala Desa Gantiwarno 3. Seluruh Anggota BPD Desa Gantiwarno 4. 3 (tiga) Warga Desa Gantiwarno
2.	Untuk mengetahui bagaimana pendekatan aparatur desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat.	1. Kepala Desa Gantiwarno 2. Kepala BPD Desa Gantiwarno 3. 3 (tiga) Masyarakat desa Gantiwarno

Maka dengan begitu total informan yang ada dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang diantaranya 1 orang Kepala Desa sebagai pemerintah desa, 6 orang BPD termasuk ketua BPD sebagai lembaga desa yang bertugas untuk mengelola aspirasi masyarakat serta 3 orang masyarakat Desa Gantiwarno Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan.

3.5 Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini mengambil data secara langsung dari sumber yang bersangkutan dengan fokus dari penelitian ini.

1. Observasi

Peneliti melakukan observasi penelitian dengan melihat bagaimana Badan Permusyawaratan Desa Gantiwarno melakukan tugas dan fungsinya dalam pemerintahan desa seperti ikut hadir pada saat jam kantor. Observasi ini juga peneliti lakukan untuk melihat bagaimana keadaan kondisi Desa Gantiwarno sebagai lokasi penelitian yang menjadi salah satu faktor pendukung atau penghambat partisipasi

masyarakat. Peneliti juga mengobservasi informan untuk melihat bagaimana keadaan informan sehingga dapat peneliti jadikan gambaran data pendukung dari tujuan penelitian. Observasi ini juga dilakukan kepada kegiatan masyarakat yang ada sehingga peneliti dapat melihat bagaimana keadaan masyarakat yang nantinya akan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah desa.

2. Wawancara

Wawancara ditujukan untuk mendapatkan data secara subjektif dan secara langsung melalui informan yang berkaitan langsung dengan permasalahan. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait permasalahan yang ada sehingga peran Badan Permusyawaratan Desa kurang maksimal dan mengetahui bagaimana penyebab dan solusi yang diawarkan dari informan. Peneliti mengkaji mengenai apa yang menjadi penyebab masyarakat tidak ikut dalam kegiatan masyarakat. Peneliti melakukan wawancara dengan informan dengan bertemu langsung di kediaman informan, jawaban serta penjabaran dari pertanyaan yang disampaikan oleh informan menjadi hasil wawancara yang didapat. Wawancara ini berhasil mendapatkan informasi mengenai kinerja Badan Permusyawaratan Desa Gantiwarno, kurangnya partisipasi masyarakat pada kegiatan Musrenbangdes serta kendala pada masyarakat untuk hadir dalam kegiatan pemerintah desa.

3. Dokumentasi

Peneliti mendokumentasi mengenai keadaan Desa Gantiwarno mulai dari sarana dan prasarana, rekaman pada saat melakukan wawancara dengan informan serta catatan yang peneliti catat pada saat melakukan penelitian. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti mendapatkan sejumlah informasi mengenai jalan yang menjadi keluhan masyarakat desa yang tak kunjung dibetulkan, serta kurangnya sarana olahraga yang dimiliki oleh Desa Gantiwarno. Peneliti mendapatkan hasil dokumentasi dengan datang ke kantor desa yang mejadi pusat data desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat sebagai data pendukung, data ini akan menggunakan jurnal artikel dan kajian lainnya sebagai bahan data pendukung. Data ini untuk melihat perbandingan yang lebih jelas terkait BPD di dalam hubungannya dengan masyarakat ataupun pemerintahan desa.

Tabel 3.2 Sumber Data

No.	Tujuan Penelitian	Sumber Data
1.	Untuk mengetahui bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes	Primer dan Sekunder
2.	Untuk mengetahui bagaimana pendekatan aparatur desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat	Primer dan Sekunder

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data agar data dapat tersaji secara rinci dan valid. Teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data Primer

Data primer ini berupa responden serta informan, namun yang akan digunakan adalah informan melihat adanya perbedaan definisi antara informan serta responden. Penelitian yang mengambil dengan gejala umum yang terjadi dan langsung mendapat jawaban dari pihak yang terkait dalam proses penelitian, dan langsung menuju pada sumber datanya. Dalam pengumpulan data primer ini terdapat beberapa teknik, yaitu:

- **Observasi**

Pengamatan secara langsung di lapangan tepatnya di desa Gantiwarno, agar penelitian dapat mengambil data secara objektif dan langsung. Observasi merupakan suatu jenis pengamatan yang melihat secara langsung bertujuan untuk memperoleh data yang ada secara objektif terkait fenomena yang terjadi serta aktivitas yang terjadi tepatnya di desa Gantiwarno (Suyatmini, 2020). Tujuan observasi dalam penelitian ini adalah untuk melihat secara langsung fakta yang terjadi dalam masyarakat desa Gantiwarno, kondisi sosial yang akan berpengaruh dengan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa dan musyawarah desa. Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah melihat bagaimana BPD bekerja dalam melaksanakan tugas dan perannya. Peneliti hadir secara langsung saat BPD bertugas di kantor balai desa. Peneliti mendapatkan informasi dari apa yang dilakukan oleh anggota BPD saat bertugas di balai desa. Peneliti juga mengobservasi saat anggota BPD menjawab pertanyaan yang diberikan peneliti. Observasi ini melihat bagaimana BPD yakin dengan jawaban yang diberikan oleh setiap anggota. Peneliti juga melakukan observasi pada fasilitas serta kondisi masyarakat Desa Gantiwarno.

- **Wawancara**

Penelitian dengan metode kualitatif juga tidak lepas dari adanya wawancara yang terjadi antara peneliti dengan informan. Maka dari itu diperlukan wawancara antara peneliti dengan informan yang menjadi sumber data pada penelitian ini. Wawancara berarti teknik pengumpulan data dengan menggali informasi lebih mendalam dengan informan yang berupa kegiatan tanya jawab dan berhadapan secara langsung atau tatap muka. Teknik ini didasarkan pada interaksi verbal secara intens dengan memiliki tujuan tertentu

(Tenawahang, 2020). Wawancara ditujukan untuk mendapatkan data secara langsung dari informan yang berhubungan langsung dengan kegiatan BPD dan interaksinya dalam masyarakat serta pemerintahan desa. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan alat bantu berupa telepon seluler serta catatan untuk mencatat jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

- **Dokumentasi**

Teknik pengambilan data ini digunakan agar menjadi bukti adanya data yang diperoleh. Teknik dokumentasi juga menjadi data penguat bagi penelitian sehingga penelitian dapat menghasilkan hasil yang nyata. Teknik dokumentasi sendiri juga memiliki berbagai macam seperti dokumenasi foto atau gambar, rekaman wawancara atau tulisan dari peneliti dari informan. Penelitian ini mengambil dokumentasi melalui foto yang diambil menggunakan kamera gawai peneliti terkait data yang didapatkan serta notulensi.

2. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung. Hasil yang tidak langsung dapat berupa tulisan, jurnal, dan sumber lainnya yang berasal dari pihak kedua. Teknik pengumpulan data sekunder ini berbasis studi pustaka, data sekunder didapat peneliti dengan melihat data yang ada di desa melalui sumber Catatan Akhir Laporan Keuangan 2023 Desa Gantiwarno, tahapan pelaksanaan ini adalah dengan menghimpun sumber-sumber yang berbasis kepastakaan, sehingga dapat menjadi referensi pendukung dalam penelitian ini.

Tabel 3.3 Teknik Pengumpulan Data

No.	Tujuan Penelitian	Teknik Pengumpulan Data
1.	Untuk mengetahui bagaimana cara Badan Permusyawaratan Desa membangun partisipasi masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes.	1. Observasi 2. Wawancara mendalam 3. Dokumentasi
2.	Untuk mengetahui bagaimana pendekatan aparatur desa dalam peningkatan partisipasi masyarakat.	1. Observasi 2. Wawancara mendalam 3. Dokumentasi

3.7 Analisis Data

Menurut Rijali (2018) mendefinisikan analisis data sebagai upaya untuk menemukan dan menyusun catatan hasil observasi, wawancara, dan tindakan lainnya secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai hasil bagi orang lain, tetapi analisis harus dilanjutkan untuk menemukan makna. Menurut Rijali, (2018), analisis data adalah untuk lebih memahami transkrip wawancara, catatan lapangan, dan materi lain yang dikumpulkan dan untuk dapat menyampaikan apa yang dimiliki, anda harus mencari, mengaturnya dengan hati-hati, dan tidak diketahui oleh orang lain. Dalam analisis data, terdapat tahap-tahap dalam menganalisis data yang terbagi menjadi 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah penyederhanaan data yang diterima oleh peneliti yang masih berupa data kasar yang diperoleh dari adanya pengamatan serta catatan-catatan yang berada di lapangan. Dalam reduksi data ini dapat meliputi meringkas data, mengkode data menelusuri tema serta membuat gugus-gugus, hal ini dapat dijalankan dengan penyeleksian data, penggolongan data atau menguraikannya secara singkat. Dengan kata lain reduksi data adalah meringkas hasil data kedalam katagori katagori konsep yang telah diambil dalam pengumpulan data (Rijali, 2018).

Peneliti melakukan reduksi data dengan menggolongkan suatu data menjadi satu bagian sehingga data tersusun dengan baik, selanjutnya peneliti masukan data berupa dokumentasi dengan mengambil intisari sehingga data dapat tergambarkan secara jelas dan terperinci.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah penyajian informasi yang disusun dengan baik dan terkonsep sehingga mampu menarik beberapa kesimpulan serta adanya aksi setelah kesimpulan tersebut didapat. Bentuk dari penyajian data ini dapat berupa catatan, matriks, grafik dan bagan bentuk ini haruslah dapat disimpulkan dengan baik agar maksud serta kesimpulan data dapat diraih.

Peneliti menyajikan data dalam bentuk catatan yang sudah direduksi dan menyimpulkan dengan poin pada setiap masalah sehingga kesimpulan data dapat terlihat dengan jelas.

3. Penarikan Kesimpulan

Upaya yang telah dilakukan oleh peneliti dalam mengkaji data lapangan. Proses ini disaji dari awal pengumpulan data sampai data siap disajikan dalam berbagai bentuk. Kesimpulan yang telah peneliti hasilkan haruslah diverifikasi kembali dengan peninjauan kembali data.

Tabel 3.4 Analisis Data

No.	Informan	Data	Pengumpulan Data	Analisis Data
1.	Kepala BPD Desa Gantiwarno	Primer	Wawancara mendalam, Dokumentasi	Deskriptif
2.	Kepala Desa Desa Gantiwarno	Primer	Wawancara mendalam	Deskriptif
3.	Seluruh Anggota BPD	Primer & Sekunder	Observasi, Dokumentasi, Wawancara mendalam	Deskriptif
4.	Masyarakat Desa Gantwarno	Primer & Sekunder	Observasi, Wawancara mendalam, Dokumentasi	Deskriptif

3.8 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengambilan data dan informasi dari informan. Keterbatasan yang ada berupa kurangnya waktu yang dimiliki

oleh sejumlah informan mengakibatkan jalannya wawancara tidak maksimal. Hal ini dikarenakan pada saat peneliti melakukan penelitian, bertepatan dengan waktu panen sehingga menyebabkan masyarakat yang menjadi sumber informan dalam penelitian ini memiliki kesibukan yang tidak dapat diganggu, sehingga peneliti sulit untuk menjadwalkan waktu bertemu dengan informan.

Peneliti dalam melakukan penelitian mempunyai keterbatasan akses, dengan jauhnya jarak tempuh lokasi penelitian mengakibatkan peneliti harus mendapatkan data secara lengkap dan menyeluruh sehingga efisiensi waktu sangat dibutuhkan, namun terhalang dengan kegiatan panen sehingga peneliti sulit untuk mengatur jadwal untuk melakukan wawancara secara mendalam. Pelaksanaan wawancara pun dilakukan dengan tergesa-gesa dikarenakan waktu yang disediakan oleh informan dilaksanakan pada jam malam atau bertepatan pada saat waktu istirahat.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Karakteristik Masyarakat Desa Gantiwarno

4.1.1 Karakteristik Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Gantiwarno

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, karakteristik masyarakat Desa Gantiwarno khususnya dalam kehidupan sosial dipengaruhi dengan lingkungan geografis dan mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat desa. Masyarakat Desa Gantiwarno yang berprofesi sebagian besar adalah sebagai petani memiliki rasa kesatuan antar masyarakatnya, dalam hasil observasi, gotong royong menjadi aspek paling menonjol. Hal ini dapat dilihat dari observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa masyarakat cenderung lebih akrab dengan masyarakat lainnya karena memiliki satu profesi yang sama dengan masyarakat lainnya, keresahan maupun hal yang berkebutuhan dalam pertanian menjadi jembatan untuk saling bisa merasakan perasaan yang serupa. Hal ini pula yang menjadikan masyarakat Desa Gantiwarno terlihat lebih mempunyai kedekatan secara emosional satu dengan yang lain dengan masyarakat lainnya.

Kegiatan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat saja, melainkan dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat. Gotong royong yang sering dilakukan oleh masyarakat desa yaitu adalah gotong royong bulanan, dimana masyarakat berkumpul pada hari jumat untuk melakukan pekerjaan yang difungsikan membenahi bagian bagian fasilitas desa yang kerap digunakan untuk kegiatan masyarakat, seperti membangun jalan desa yang ada, membenahi bagian jalan desa yang sudah mulai rusak juga membuat polisi tidur pada jalan desa. Kegiatan gotong royong lainnya yang ada pada masyarakat desa yaitu berupa rawan

(masak-masak dalam jumlah besar untuk acara tertentu) dimana hal ini adalah hal yang dimiliki oleh penduduk Desa Gantiwarno yang disebabkan karena tingginya rasa kepedulian antar masyarakat yang ada, hal ini menjadi salah satu sebab masyarakat Desa Gantiwarno memiliki komunikasi yang baik antar masyarakatnya.

4.1.2 Fasilitas Umum Desa Gantiwarno

4.1.2.1 Sarana dan Prasarana Desa Gantiwarno

Sarana dan prasarana yang disediakan oleh desa khususnya Desa Gantiwarno sudah cukup memadai namun diperlukan adanya revitalisasi ulang. Berdasarkan observasi, kondisi fasilitas umum khususnya lapangan diperlukan adanya perbaikan. Masyarakat desa dapat memenuhi kebutuhan dengan fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah desa seperti Masjid, Kapel Gereja, Puskesmas, Lapangan Olahraga. Jumlah yang disediakan oleh pemerintah desa belum mencukupi namun fasilitas tersebut sudah dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat desa. Data sarana dan prasarana yang ada pada Desa Gantiwarno, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Gambar 4.1 Puskesmas Desa Gantiwarno



Sumber: Dokumentasi Lapangan 2024

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa Desa Gantiwarno mempunyai satu unit Puskesmas. Puskesmas ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat desa dalam bidang kesehatan. Fasilitas ini berada tepat dekat Kantor Desa, dimana menjadi satu-satunya fasilitas kesehatan tingkat desa yang ada pada Desa Gantiwarno. Meski fasilitas ini dekat Kantor Desa Gantiwarno, penampakan bangunan belum terlihat diperbaharui. Meskipun begitu, kantor ini beroperasi dengan baik mulai Senin sampai Jumat.

Gambar 4.2 Infrastruktur Jalan Desa Gantiwarno



Sumber: Dokumentasi Lapangan 2024

Berdasarkan gambar 4.2 di atas, kondisi infrastruktur Desa Gantiwarno berupa jalan desa terlihat sudah mulai tidak rata dan berlubang. Menurut hasil data yang dilakukan oleh peneliti, jalan utama desa Gantiwarno mulai diperbaiki pada tahun 2013 (dua ribu tiga belas), namun hingga saat ini belum ada perbaikan jalan kembali yang dilakukan oleh pemerintah desa Gantiwarno. Kondisi berbeda dapat dilihat pada jalan ruas desa, dimana setiap dusun belum tentu mendapatkan pemerataan pengecoran.

Gambar 4.3 Infrastruktur Lapangan Voli Desa Gantiwarno



Sumber: Dokumentasi Lapangan 2024

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, infrastruktur berupa lapangan voli berjumlah 2 lapangan. Kondisi lapangan tersebut belum dapat banyak perhatian dari pemerintah desa. Lapangan Voli tersebut tidak memiliki tiang dan lapangan masih menggunakan tanah pada bagian bawah. Masyarakat Desa Gantiwarno memang jarang menggunakan lapangan ini, baik dalam kondisi kegiatan formal ataupun non-formal. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pemuda dan pemudi Desa Gantiwarno lebih fokus pada kegiatan dengan pekerjaan, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian petani, pemuda pemudi menghabiskan banyak waktu di ladang. Namun, apabila tidak sedang ke ladang, mereka akan banyak menghabiskan waktu dengan berkumpul bersama keluarga, atau berkunjung ke rumah teman. Pada saat acara khusus seperti Lomba Agustusan, lapangan ini baru digunakan dan dapat di dekorasi oleh masyarakat sehingga menjadi sarana utama bagi masyarakat Desa Gantiwarno melangsungkan kegiatan.

Gambar 4.4 Infrastruktur Pendidikan Desa Gantiwarno



Sumber: Dokumentasi Lapangan 2024

Berdasarkan gambar 4.5 di atas, Desa Gantiwarno memiliki infrastruktur di bidang pendidikan. Infrastruktur tersebut mencakup satu unit Taman Kanak-kanak serta satu unit Sekolah Dasar Negeri. Taman Kanak-kanak Desa Gantiwarno mempunyai letak di dekat Kantor Desa Gantiwarno, sedangkan Sekolah Dasar Negeri 01 Desa Gantiwarno tidak berada jauh pada Kantor Desa Gantiwarno. Desa Gantiwarno tidak memiliki tingkatan lanjutan pendidikan setelah Sekolah Dasar, siswa yang sudah tamat Sekolah Dasar akan melanjutkan pendidikan di kecamatan lain.

4.2 Sejarah Desa Gantiwarno

Desa Gantiwarno merupakan pemekaran wilayah dengan desa sebelumnya yaitu Desa Sukanegara. Pemekaran wilayah ini terjadi pada tahun 2006, secara administratif Desa Gantiwarno resmi berpisah dengan Desa Sukanegara pada tahun 2007. Desa Gantiwarno merupakan desa dengan penduduk mayoritas bersuku Jawa, suku Jawa mendominasi dikarenakan adanya program pemerintah yaitu Transmigrasi. Transmigrasi masyarakat terjadi pada tahun 1950, pada tahun tersebut suku asli sebagian daerah Desa Sukanegara yang sekarang bernama Desa Gantiwarno memang tidak banyak, lahan kosong dan wilayah tidak berpenduduk masih mendominasi wilayah tersebut. Nama Desa Gantiwarno sendiri diambil dari wilayah asli masyarakat

transmigran yaitu Desa Gantiwarno, Klaten, Jawa Tengah. Masyarakat transmigran memiliki kemampuan untuk dapat mempertahankan hidup di tempat yang baru dengan membangun segala aspek kehidupan yang menunjang untuk dapat bertahan hidup. (Handoko, 2021)

4.3 Letak Geografis Desa Gantiwarno

Desa Gantiwarno merupakan desa yang terletak di wilayah Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Desa Gantiwarno mempunyai luas tanah seluas 514 ha. Lokasi Desa Gantiwarno sangat jauh dari perkotaan dan Desa Gantiwarno juga dikelilingi oleh desa lainnya. Desa Gantiwarno memiliki fasilitas umum seperti rumah ibadah yaitu Masjid dan Gereja, lalu fasilitas umum lainnya seperti tempat olahraga berupa lapangan, dalam hal ini lapangan yang dimaksud adalah lapangan voli, lalu ada balai desa yang peruntukannya juga untuk pengumpulan masyarakat bila terdapat program pemerintah. Desa Gantiwarno juga memiliki fasilitas pendidikan berupa Sekolah Dasar dan juga Taman Kanak-kanak, lalu fasilitas umum kesehatan juga terdapat berupa fasilitas kesehatan yaitu Puskesmas.

Tabel 4.1 Pemanfaatan Wilayah Desa Gantiwarno

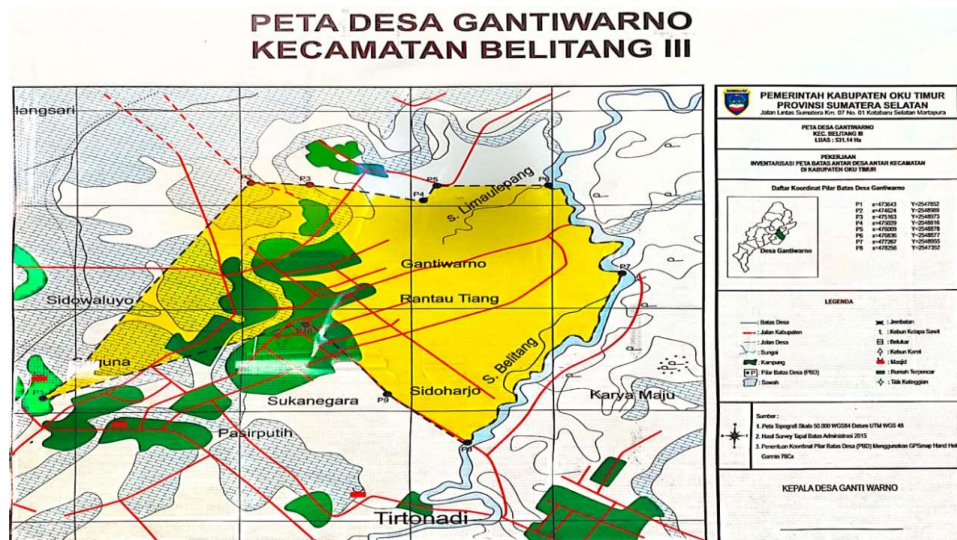
Keterangan	Luas Wilayah
Jalan	0,25 ha
Pekarangan/Perumahan	107 ha
Persawahan	360 ha
Bangunan Umum	0,5 ha
dst	

Sumber : Catatan Akhir Laporan Keuangan Desa 2023

Berdasarkan tabel, persawahan merupakan aspek wilayah yang paling dominan di Desa Gantiwarno dengan luas 360 ha. Perumahan merupakan penggunaan wilayah terbanyak ke dua dengan luas 107 ha. Bangunan umum menempati posisi ke tiga dimana luas wilayah yang digunakan yaitu seluas

0,5 ha. Pemanfaatan jalan dalam wilayah Desa Gantiwarno juga memiliki porsi seluas 0,25 ha menjadikan pemanfaatan wilayah berupa jalan menempati posisi terakhir.

Gambar 4.5 Peta Desa Gantiwarno



Sumber : Peta Desa Gantiwarno Kecamatan Belitang III

Desa Gantiwarno merupakan desa dengan kondisi wilayah yang baik untuk pertanian. Seluas 306 ha dari 504 ha luas wilayah Desa Gantiwarno adalah persawahan, sehingga melalui kondisi wilayah ini mayoritas masyarakat adalah petani. Dalam Peta bisa dilihat bahwa pemukiman memiliki ruang wilayah yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan persawahan.

Desa Gantiwarno merupakan desa yang ada pada bagian timur Kecamatan Belitang III. Kondisi Desa Gantiwarno juga dikelilingi oleh desa-desa yang ada disekitar Desa Gantiwarno. Perbatasan antar desa yang mengelilingi Desa Gantiwarno berupa persawahan, dengan patok yang sudah dikalkulasikan oleh pemerintah desa dengan pemerintahan kabupaten, berdasarkan hasil wawancara hal ini dilakukan agar letak batas wilayah antar desa absolut dan pasti.

Tabel 4.2 Perbatasan Desa Gantiwarno

No.	Letak Wilayah	Nama Desa
1.	Utara	Desa Talangsari
2.	Timur	Desa Karya Maju
3.	Selatan	Desa Tirtonadi
4.	Barat	Desa Sidowaluyo

Sumber : Catatan Akhir Laporan Keuangan Desa 2023

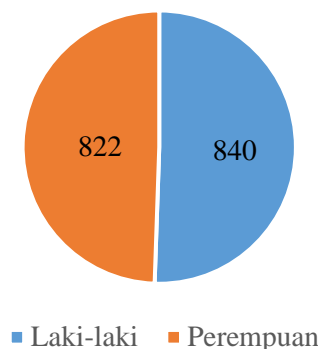
Pada tabel di atas diketahui bahwa perbatasan Utara Desa Gantiwarno adalah Desa Talangsari, perbatasan Timur Desa Gantiwarno adalah Desa Karya Maju, perbatasan selatan Desa Gantiwarno adalah Desa Tirtonadi, sedangkan perbatasan sebelah Barat Desa Gantiwarno adalah Desa Sidowaluyo. Desa yang memiliki perbatasan berupa persawahan dengan Desa Gantiwarno adalah Desa Talangsari, Desa Tirtonadi dan Desa Sidowaluyo, sedangkan Desa Karya Maju memiliki perbatasan berupa sungai yang mengalir memisahkan Desa Gantiwarno dengan Desa Karya Maju.

4.4 Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat

4.4.1 Jumlah Penduduk

Desa Gantiwarno mempunyai jumlah penduduk sejumlah 1.662 jiwa dengan 496 jumlah Kepala Keluarga (KK). Jumlah populasi masyarakat yang ada di Desa Gantiwarno merupakan jumlah yang diambil dari sensus penduduk pada tahun 2023. Dalam observasi yang dilakukan oleh peneliti, jumlah penduduk paling banyak masyarakat di Desa Gantiwarno merupakan masyarakat bersuku Jawa. Penduduk Desa Gantiwarno merupakan penduduk imigrasi, kebanyakan penduduk desa Gantiwarno merupakan masyarakat asli dari daerah Jawa yang pindah dan menetap di Desa Gantiwarno, sedangkan penduduk asli Desa Gantiwarno merupakan penduduk yang sudah bercampur dengan masyarakat suku Jawa dari hasil perkawinan atau berpindah ke wilayah desa lain.

Gambar 4.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber: Catatan Akhir Laporan Keuangan Desa 2023

Berdasarkan gambar 4.6, terdapat perbedaan dalam jumlah penduduk antara pria dan wanita dengan selisih yang tidak terlalu jauh, yaitu 18 jiwa.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No.	Rentang Usia	Jumlah
1.	0-9 Tahun	70
2.	10-19 Tahun	345
3.	20-29 Tahun	365
4.	30-39 Tahun	562
5.	40-49 Tahun	143
6.	50-59 Tahun	125
7.	>60 Tahun	52

Sumber: Catatan Akhir Laporan Keuangan Desa 2023

Berdasarkan tabel 4.3, penduduk Desa Gantiwarno mayoritas didominasi masyarakat dengan usia produktif, yaitu dengan rentang usia tiga puluh sampai dengan tiga puluh sembilan tahun. Sedangkan, di posisi kedua rentang usia mayoritas Desa Gantiwarno adalah pemuda rentang usia dua puluh sampai dengan dua puluh sembilan tahun. Pemuda serta pemudi yang ada di Desa Gantiwarno adalah masyarakat yang mempunyai pekerjaan mayoritas sebagai petani.

4.4.2 Riwayat Pendidikan Masyarakat Desa Gantiwarno

Pendidikan menjadi hal yang penting mengingat pendidikan merupakan aspek utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan menjadi penting karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan ekonomi yang menjadi faktor pendukung dalam pemerataan pembangunan desa. (Mouren et al., 2022)

Penduduk Desa Gantiwarno memiliki sebuah gedung sekolah yang merupakan sarana untuk menimba ilmu bagi penduduk desa. Fasilitas pendidikan tersebut berupa Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Negeri. Desa Gantiwarno hanya memiliki 1 gedung Taman Kanak-Kanak dan 1 Gedung Sekolah Dasar Negeri. Masyarakat Desa Gantiwarno yang ingin melanjutkan pendidikan akan berpindah sekolah ke kecamatan yang memiliki fasilitas pendidikan yang mendukung. Namun, adanya fasilitas pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah desa, masih terdapat masyarakat desa yang belum menyadari pentingnya pendidikan. Sebagian masyarakat Desa Gantiwarno memilih untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, hal tersebut dikarenakan tuntutan ekonomi keluarga sehingga masyarakat desa memilih langsung bekerja.

Tabel 4.4 Riwayat Pendidikan Desa Gantiwarno

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	Tidak Tamat Sekolah Dasar	40 Jiwa	2,4%
2.	Belum Tamat Sekolah Dasar	500 Jiwa	30%
3.	Tamat SD/Sederajat	50 Jiwa	3%
4.	Tamat SMP	411 Jiwa	24,7%
5.	Tamat SMA	168 Jiwa	10,1%
6.	D1	3 Jiwa	0,18%
7.	D2	5 Jiwa	0,3%
8.	S1	7 Jiwa	0,42%
9.	S2	2 Jiwa	0,12%

No.	Pendidikan	Jumlah	Persentase
10	Tidak Terdata	476 Jiwa	28,6%
Jumlah		1662 Jiwa	

Sumber Catatan Akhir Laporan Keuangan Desa 2023

Berdasarkan tabel penduduk Desa Gantiwarno dengan riwayat pendidikan yang paling banyak adalah masyarakat yang belum tamat Sekolah Dasar dengan jumlah penduduk 500 Jiwa dengan persentase 2,4%. Sedangkan di posisi kedua dengan jumlah penduduk paling banyak yaitu adalah penduduk dengan tamatan Sekolah Menengah Pertama dengan jumlah 411 jiwa dengan persentase 24,7%. Masyarakat Desa Gantiwarno belum semua terdata pada riwayat pendidikan oleh pemerintah desa. Menurut informan penelitian, hal tersebut dikarenakan data yang ada belum diperbaharui, hal ini dipengaruhi oleh perubahan demografis yang cepat di Desa Gantiwarno.

Peran pendidikan dalam pembangunan desa memiliki kontribusi yang tinggi. Masyarakat dengan pendidikan yang tinggi akan semakin mengerti dan memahami mengenai rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di desa. (Supiyanto, Astuty, & Unwanullah, 2020)

4.4.3 Mata Pencaharian

Kondisi geografis yang ada di Desa Gantiwarno merupakan kondisi yang sangat cocok untuk persawahan, maka dari itu mayoritas area yang ada adalah persawahan. Sedangkan persebaran mata pencaharian masyarakat Desa Gantiwarno bukan hanya sebagai petani pekerjaan tersebut juga mengandalkan jasa, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Karyawan, Pejabat Pemerintah Desa, dan Buruh. Data persebaran mata pencaharian masyarakat Desa Gantiwarno dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.5 Mata Pencaharian Penduduk Desa Gantiwarno

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Persentase
1.	Petani	1100 Jiwa	66,18%

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk	Persentase
2.	Tenaga Tukang (Bangunan)	28 Jiwa	1,68%
3.	Buruh	20 Jiwa	1,20%
4.	Guru non-PNS	14 Jiwa	0,84%
5.	Karyawan	11 Jiwa	0,66%
6.	Perangkat Desa	9 Jiwa	0,54%
7.	PNS-Pensiunan-TNI/POLRI	8 Jiwa	0,48%
8	Tidak Terdata	472 Jiwa	28,39%
	Total	1662 Jiwa	

Sumber: Catatan Akhir Laporan Keuangan Desa 2023

Berdasarkan pada tabel Mata Pencaharian yang paling banyak dikerjakan oleh masyarakat desa adalah Petani sedangkan tenaga tukang menjadi profesi yang digeluti masyarakat desa dengan 28 jiwa, selanjutnya profesi buruh menempati posisi ke tiga dengan jumlah 20 jiwa, Guru Non-PNS menempati posisi ke empat dengan jumlah 14 jiwa, masyarakat desa yang berprofesi sebagai karyawan mempunyai data sebanyak 11 jiwa, sedangkan perangkat desa menjadi profesi dengan jumlah 9 jiwa dan PNS maupun pensiunan TNI/POLRI mempunyai data dengan jumlah 8 jiwa.

4.5 Visi dan Misi Desa

a) Visi

Desa Gantiwarno memiliki visi untuk mewujudkan pembangunan melalui pembangunan infrastruktur, serta pembangunan manusia dengan kemandirian baik pangan dan pemberdayaan manusia serta spiritual. Hal yang lebih ditekankan adalah pembangunan manusia dengan berlandaskan spiritual, agar tercapainya masyarakat yang sejahtera dan religius. Pembangunan infrastruktur dan religiusitas dapat dilihat dengan banyaknya tempat ibadah yang ada di Desa Gantiwarno, dengan berlandaskan pada religiusitas pada masyarakatnya, Desa Gantiwarno ini diharapkan lebih terbuka dan jujur terhadap tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama.

b) Misi

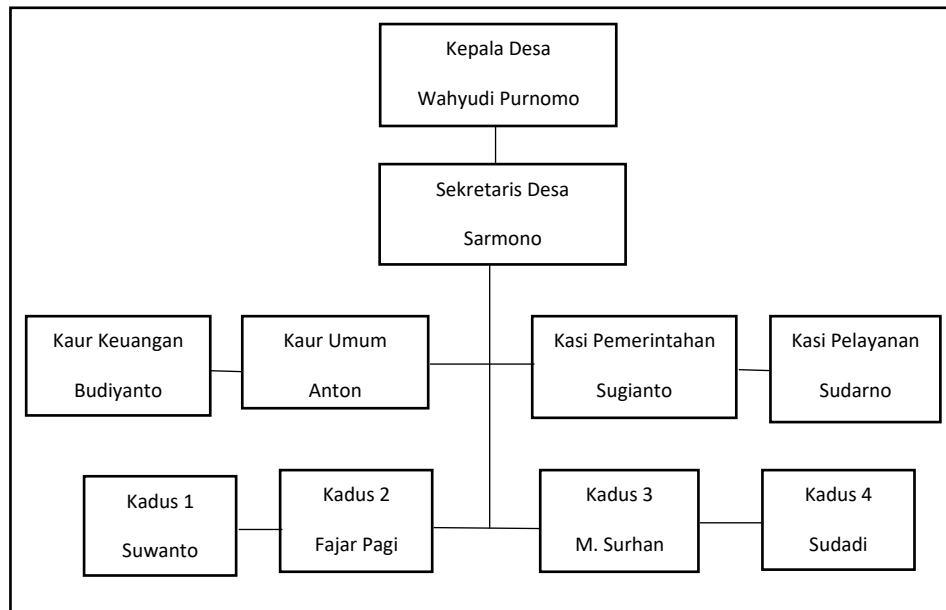
Misi Desa Gantiwarno dapat dilihat pada list dibawah ini, yaitu,

1. Melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan agama untuk mendorong kemandirian masyarakat.
2. Melaksanakan pembangunan dibidang infrastruktur untuk mendorong kelancaran transportasi dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Bekerja sama dengan pihak terkait untuk menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat.
4. Menggali berbagai potensi desa untuk menjadikan masyarakat sejahtera.

4.6 Struktur Pemerintahan Desa Gantiwarno

Perangkat Desa yang ada dalam Desa Gantiwarno mempunyai 4 lapisan bidang kepengurusan yaitu, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi/Urusan, dan Kepala Dusun. Dalam bagian Urusan, Desa Gantiwarno memiliki 4 bidang diantaranya, Kepala Seksi Bidang Pemerintahan, Kepala Seksi Keuangan, Kepala Urusan Umum dan juga Kepala Urusan Pelayanan dan Kesejahteraan. Perangkat desa yang ada di Desa Gantiwarno berjumlah 9 orang.

Gambar 4.7 Struktur Pemerintahan Desa Gantiwarn



Sumber: Data Lapangan 2024

Dalam tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa struktur pemerintahan paling atas adalah Kepala Desa. Kepala Desa Gantiwarno mempunyai peran sebagai pemimpin pemerintahan desa dengan bertanggung jawab atas administrasi pemerintahan desa. Kepala Desa juga mempunyai tugas sebagai pelayan masyarakat. Tugas ini berupa menyediakan akses bagi masyarakat yang hendak melaporkan aspirasi terhadap pembangunan desa.

Sekretaris desa memiliki tugas sebagai pengelola administrasi desa. Tugas administrasi desa merupakan tugas yang mampu bertanggung jawab dalam mengelola dokumen dan arsip penting di desa. Tugas lainnya berupa notulen dalam rapat musyawarah desa, rapat koordinasi serta rapat yang melibatkan perangkat desa.

Kepala desa dan sekretaris desa membawahi struktur pemerintahan desa lainnya yaitu kepala urusan keuangan, kepala urusan umum, kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pelayanan beserta kepala dusun yang ada di Desa Gantiwarno. Kepala urusan keuangan mempunyai tugas untuk mengelola dan mencatat keuangan . Pengelolaan keuangan ini dapat berupa penyusunan

anggaran desa, mengevaluasi dan memantau anggaran serta menerima dan menyalurkan dana sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

Kepala urusan umum Desa Gantiwarni memiliki peran dalam pemerintahan desa berupa pengelolaan administrasi umum dan koordinator kegiatan desa. Pengelolaan administrasi umum dapat berupa mengelola surat yang masuk dan keluar di tingkat desa, serta pembuatan surat dan pendistribusian surat sesuai dengan perintah kepala desa. Kepala urusan umum Desa Gantiwarno juga mempunyai tugas sebagai koordinator kegiatan desa, tugas tersebut berupa penyusunan jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan di Desa Gantiwarno.

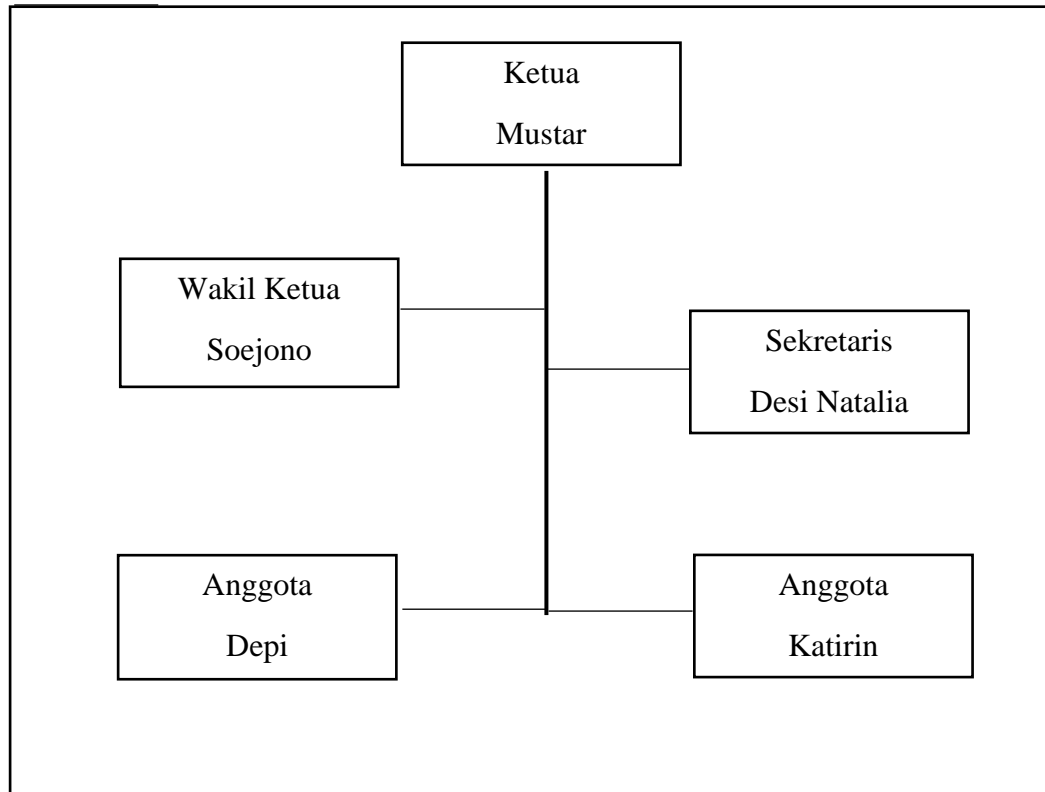
Kepala seksi pemerintahan Desa Gantiwarno memiliki tugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa. Tugas tersebut berupa menyelenggarakan rapat koordinasi yang ada di desa, memastikan kebijakan yang ada di desa dijalankan dengan baik.

Kepala seksi pelayanan Desa Gantiwarno memiliki tugas dan peran dalam pemerintahan desa berupa penyelenggaraan pelayanan administratif dan menjaga kepuasan pelayanan yang ada di masyarakat. Tugas tersebut berupa pemberian pelayanan pada izin usaha serta kegiatan sosial masyarakat. Kepala seksi pelayanan juga mengevaluasi pelayanan yang ada di Desa Gantiwarno dengan rapat bersama perangkat desa.

Kepala dusun Desa Gantiwarno memiliki tugas dan peran sebagai pelaksana kebijakan pemerintah desa. Tugas kepala dusun ini untuk memastikan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa berjalan dengan baik sampai kepada masyarakat desa. Kepala dusun bertugas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan desa.

4.7 Struktur Badan Permusyawaratan Desa Gantiwarno

Gambar 4.8 Struktur Lembaga BPD Desa Gantiwarno



Sumber: Data Lapangan 2024

Badan Permusyawaratan Desa Desa Gantiwarno dikepalai oleh Bapak Mustar dan memiliki empat anggota. Tugas ketua BPD Desa Gantiwarno yaitu memimpin dan mengelola lembaga BPD, mendukung penyusunan dan pengawasan peraturan yang dibuat bersama kepala desa, dan memantau kinerja pemerintahan desa. Bapak Sujono mengemban tugas sebagai wakil ketua BPD, tugas wakil ketua BPD adalah membantu dan mendukung ketua BPD dalam melaksanakan tugas dan menggantikan ketua BPD apabila berhalangan. Tugas selanjutnya berupa melaksanakan koordinasi internal dalam melaksanakan program kerja yang sudah dilaksanakan.

Sekretaris BPD Desa Gantiwarno diemban oleh Ibu Desi Natalia. Sekretaris Desa memiliki tugas berupa pengelolaan administrasi dengan menyusun dan mengarsipkan dokumen penting BPD. Sekretaris BPD juga bertugas untuk

mewujudkan program-program yang telah direncanakan oleh BPD. Selanjutnya, anggota BPD dibawah sekretaris BPD yaitu Bapak Depi dan Bapak Katirin. Tugas dan tanggung jawab struktur anggota BPD yaitu ikut dalam rapat-rapat yang telah direncanakan oleh Kepala Desa, rapat yang diagendakan oleh lembaga BPD dan rapat yang berkaitan dengan kepentingan desa. Tugas selanjutnya yang ditanggung oleh anggota BPD yaitu untuk menyampaikan aspirasi yang ada di masyarakat kepada aparatur desa dan juga memberikan laporan kinerja kepada masyarakat Desa Gantiwarno.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah menjabarkan mengenai peran yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai perangkat desa, untuk membangun partisipasi yang ada didalam masyarakat Desa Gantiwarno. Peneliti menemukan bagaimana peran yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa seperti mengajak masyarakat untuk aktif dalam kegiatan Musrenbangdes. Peneliti menemukan poin-poin penting dalam penelitian yaitu (1) BPD Desa Gantiwarno menjalankan tugasnya membangun partisipasi melalui komunikasi yang intens dengan masyarakat, kegiatan kemasyarakatan seperti yasinan, sembahyangan, dan hajatan, serta undangan dari BPD yang mana menunjukkan bahwa kurangnya penyampaian informasi detail mengenai Musrenbangdes oleh BPD menjadi penyebab masyarakat menganggap Musrenbangdes hanya sebuah formalitas. (2) Pemerintah Desa Gantiwarno mengesampingkan aspirasi yang diberikan dan mendahulukan aspirasi yang bersifat mendesak. Hal tersebut menyebabkan sulitnya memberikan aspirasi kepada pemerintah desa (3) BPD tidak memiliki pedoman untuk menjalankan pemerintahan sehingga kinerja BPD hanya diatur dan mengikuti arahan Kepala Desa yang menyebabkan BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. (4) Konformitas sosial menjadi cara meningkatkan partisipasi masyarakat yang efisien, hal ini mewajibkan adanya kedekatan hubungan yang lebih antar masyarakat dan pemerintah desa agar dapat berpartisipasi membangun desa.

Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana BPD membangun partisipasi masyarakat dengan menggunakan teori Peran dari Soerjono Soekanto. Peneliti juga membahas bagaimana peran BPD sebagai perangkat desa yang

mempunyai status sosial yang lebih tinggi dari mayoritas masyarakat dapat membangun partisipasi masyarakat dan ditemukan kendala berupa lingkup BPD yang masih belum memahami sistem kinerja BPD yang baik sehingga implementasi kepada masyarakat tidak efektif dan berakibat kurangnya partisipasi yang diberikan oleh masyarakat. BPD sebagai wadah aspirasi serta wakil dari masyarakat desa mempunyai peran lebih sesuai dengan jabatannya dalam status sosial masyarakat, dengan memiliki peran lebih, sebaiknya BPD menerapkan cara efektif untuk membangun partisipasi dalam Musrenbangdes sehingga menimbulkan pembangunan dalam sifat perencanaan yang ada. Penelitian ini relevan dengan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu Teori Peran dari Soerjono Soekanto, walaupun peran yang dilaksanakan oleh BPD Desa Gantiwarno dalam membangun partisipasi masyarakat belum berjalan secara maksimal, sehingga pemerintah desa bersamaan dengan BPD Desa Gantiwarno sebagai wakil masyarakat desa perlu untuk meningkatkan peran dalam membangun partisipasi masyarakat yang ada dalam Desa Gantiwarno.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diberikan oleh peneliti di antaranya:

1. BPD dan Perangkat Desa hendaknya memberikan sosialisasi mengenai kegiatan Musrenbangdes dengan lebih intens. Pemberian sosialisasi dan pentingnya Musrenbangdes untuk pembangunan desa dibutuhkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat manfaat adanya partisipasi masyarakat.
2. Pemerintah desa hendaknya mengupayakan sistem kinerja yang lebih baik dan hubungannya dengan masyarakat, sehingga tidak ada kecemburuan yang timbul dalam masyarakat terkait kebijakan yang diatur oleh pemerintah desa.
3. BPD baiknya dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan dan mempunyai pedoman untuk menjalankan sistem pemerintahan

sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik dan tidak hanya bergantung kepada Kepala Desa.

4. Masyarakat Desa Gantiwarno hendaknya menghargai kinerja dari Pemerintah Desa Gantiwarno dengan ikut dalam kegiatan desa seperti Musrenbangdes untuk membangun desa agar menjadi desa maju dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, I. (2021). Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *DE LEGA LATA Jurnal Ilmu Hukum*, 6, 131.
- Ajawaila, L. G., Rompas, W. Y., & Tulusan, F. M. G. (2021). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, VII(104), 19–26. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/33693/31878>
- Andriani, K. (2021). Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi COVID-19 di Desa Pasar Lembu Kabupaten Asahan. *SKRIPSI Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1, 1–74.
- Anita Rahman, S. (2020). Penguatan Peran Orang Tua Dalam Mendampingi Pendidikan Anak Usia Dini Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Golden Age*, 4(02), 322–331. <https://doi.org/10.29408/jga.v4i02.2520>
- Ayu, S., Semaun, S., Muliati, Suarning, & Bahri, A. (2024). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pengelolaan Lingkungan Melalui Program Bank Sampah Di Kota Parepare. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 10132–10140. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
- Aziz, F. A. (2020). Moral Peserta Didik Dan Pendidikan Islam Menurut Pemikiran ‘Athiyah Al-Abrasyi. *El-Tarbawi*, 13(1), 45–64. <https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol13.iss1.art3>
- Baihati, L. N., Atmojo, M. E., & Pratiwi, V. P. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Raji Kecamatan Demak Kabupaten Demak Tahun 2017. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.12>
- Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam

- Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2342>
- Chotijah, F., & Pratiwi, R. M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Narkoba Di Garut. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 5(1), 160–176.
- Darin, Moonti, U., & Indriyani, S. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Desa. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 7(1), 11–21. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4502>
- Dwinarko, D., Sulistyanto, A., Widodo, A., & Mujab, S. (2021). Pelatihan Manajemen Komunikasi pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Yumary : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 217–225. <https://doi.org/10.35912/yumary.v1i4.314>
- Endah, K. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal MODERAT*, 4(November), 25–33. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat>
- Faiza, N., Jamaludin, & Harahap, A. (2020). Efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Bongkang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong. *Japb*, 3(2), 428.
- Firmansyah, M., Masrun, M., & Yudha S, I. D. K. (2021). Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(2), 156–159. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v3i2.46>
- Guampe, F., Umar, Amane, A., Nur, M., Mahardhani, J., Habibie, F., Hartati, A., Pamuttu, D., Amruddin, Akbar, M., Sinurat, J., Hidayah, D., Nababan, D., & Abidin, Z. (2022). *Pembangunan Pedesaan: Prinsip, Kebijakan, dan Manajemen* (E. Damayanti (ed.)). Widina Bhakti Persada Bandung. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/558537-pembangunan-pedesaan-prinsip-kebijakan-d-1d691587.pdf>

- Hadawiya, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 192–200. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>
- Handayani, A., Rahmawati, A., & Malik, M. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, 13(1), 64–71. <https://doi.org/10.33366/rfr.v13i1.4333>
- Heremba, S. P., Lambali, S., & Hasniati. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pembangunan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, 11(2), 165–177. <http://www.ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/view/4886%0Ahttps://www.ejournal.unmus.ac.id/index.php/societas/article/download/4886/2570>
- Herman. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Ulidang Kecamatan Tammerodo Kabupaten Majene. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 78.
- I Komang Gerdion Ananda Junior, I Ketut Kasta Arya Wijaya, & I Wayan Arthanaya. (2021). Efektivitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Desa Blahkiuh, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 391–396. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3446.391-396>
- Jailani, M. (2019). Hubungan Status Sosial Ekonomi Orang Tua Terhadap Motivasi Anak Untuk Berwirausaha. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 35–42. <https://doi.org/10.33084/pedagogik.v14i1.835>
- Kurnia, L., Sarmiati, & Arif, E. (2022). Komunikasi Politik Anggota Dprd Prov Sumbar Dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Ensiklopediaku*, 5(1), 77–91.
- Latunussa, T., Sialana, F., & Abas, A. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan di Desa Bebar Kecamatan Damer Kabupaten Maluku Barat Daya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 9584–9594.

<https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/3939%0Ahttps://www.jptam.org/index.php/jptam/article/download/3939/3282>

- Maji, R., Pasolo, F., Yamin Noch, M., & Sonjaya, Y. (2024). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Keerom. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 7(1), 53–68.
- Mouren, V., Lutherani Ch. P, A., & Tumangkeng, S. Y. . (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 133–144.
- Nasrin, N., Wiridin, D., & Rezi, L. (2023). Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan. *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio*, 4(1), 19–30. <https://doi.org/10.55340/jkw.v4i1.1009>
- Padilah, A. H., Fayuni, D. F., & Nurviyanti, M. D. (2023). Partisipasi Politik dalam Pembangunan Desa di Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi. *Journal of Social and Policy Issues*, 4, 192–201. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i4.265>
- Pamungkas, B. A. (2016). Pelaksanaan otonomi desa pasca Undang-Undang implementation of the post-regulation autonomy of village number 6 of 2014 concerning Village. *Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019*, 2(2), 210–229.
- Pasha, D. A., Alqadri, B., Dahlan, D., & Mustari, M. (2022). Pelaksanaan Program Sekolah Ramah Anak di SMPN 1 Gunungsari. *Manazhim*, 4(2), 232–259. <https://doi.org/10.36088/manazhim.v4i2.1787>
- Pohuwato, U., & Pohuwato, K. (2023). *Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Pembentukan Peraturan Desa yang Partisipatif di Kabupaten Pohuwato*. 05(02), 4987–4999.
- Purba, I., Sitanggang, M., & Gultom, L. (2022). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sionggang Tengah Kecamatan Lumban Julu Kabupaten Toba

- Tahun 2020-2022. *IO(2)*, 260–272.
- Rafiq, A., & Asrizal, M. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Jang Kecamatan Moro Kabupaten Karimun. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, *6(2)*, 223–229. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5972](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5972)
- Rahman, A. (2022). Partisipasi Masyarakat Sipil Dalam Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, *1(3)*, 139–150. <https://journal-nusantara.com/index.php/J-CEKI/article/view/211>
- Ridawati br. Tarigan, & Rizky Pratama Putra Karo Karo. (2023). Musyawarah Desa Sebagai Komunikasi Pembangunan yang Efektif untuk Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tanaman Kopi di Kecamatan Sidikalang, Kab Dairi, Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Lemhannas RI*, *10(4)*, 41–51. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.369>
- Rinto, M., Muhiddin, A., & Mone, A. (2021). Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Laikang Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, *2(1)*, 24–37. <https://doi.org/10.47134/villages.v2i1.11>
- Rizal, D. A., Rohma, Y. A., & Bahri, M. S. (2022). *jurnal Potensi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Budaya dan SDA*. *3(2)*, 75–84.
- Romla, P. Y., Salemuddin, M. R., & Amir, A. (2022). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembangunan Di Desa Golo Lebo Kecamatan Elar Kabupaten Manggarai Timur Nusa *Jisos: Jurnal Ilmu ...*, 3376. <https://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/view/1867%0Ahttps://bajangjournal.com/index.php/JISOS/article/download/1867/1303>
- Rukayat, Y., Rahim, R., Putri, T., & Ardianto, M. (2020). Koordinasi Kelembagaan Desa Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Di Desa Margaluyu Kecamatan Cipendeuy Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, *14*, 1–203.

- Rustam, A., Rodi Wahyudi, & Muhammad Rizki Hidayat. (2023). Peran Bupati Dalam Musrenbangdes. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 4(1), 22–30. <https://doi.org/10.31849/joels.v4i1.12518>
- Sari, P. A., & Askari, S. (2021). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Desa Menurut Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Manabia: Journal of Constitutional Law*, 1(1), 95–106. <https://doi.org/10.28918/manabia.v1i1.4518>
- Sarinah, S., Setiawati, B., & Jamaludin, J. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbang Desa Di Desa Jirak Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. *Japb*, 4. <http://stiatabalong.ac.id/ojs3/index.php/JAPB/article/view/426%0Ahttp://stiatabalong.ac.id/ojs3/index.php/JAPB/article/download/426/353>
- Setiawan, F. (2023). Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Tumbang Bantian. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 4(34–51), 48–58.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers.
- Sudianing, N. K., & Ardana, D. M. J. (2022). Efektivitas Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Masa Pandemi Covid19 Di Desa Padangbulia Kecamatan Sukasada. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 14(2), 1–16.
- SUPRIADI, D. (2021). Kepimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Ganec Swara*, 15(1), 921. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.192>
- Susi Iswanti, S. I., & Zulkarnaini, Z. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Tilan di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 92–103. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9307](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9307)
- Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal*

Ilmiah Cakrawarti, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.239>

- Tenawahang, M. N. P. (2020). Perhatian Orang Tua terhadap Belajar Peserta Didik di SMPS St. Antonius Padua Leworahang. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya*, 1(1), 35–40. <http://jurnal.stpreinha.ac.id/index.php/japb/article/view/42>
- Ujud Rusdia, & Wirawan, D. (2020). fungsi BPD Dalam Meningkatkan Pembangunan Masyarakat Desa Di Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung. *Jurnal JISIPOL*, 4(April), 139–153.
- Wahyudi, A., & Setijaningrum, E. (2022). Inovasi Kebijakan Pemilihan Kepala Desa dalam Mereduksi Patronase Pemanfaatan Aset Desa di Kabupaten Tuban. *Matra Pembaruan*, 6(2), 133–145. <https://doi.org/10.21787/mp.6.2.2022.133-145>
- Yudin, J., Solihah, E. S., Romdani, A., Sutisna, N., & Fauziyah, R. N. (2023). Pembentukan Balkon sebagai Upaya Penguatan Nilai Musyawarah dan Nilai Sosial di Desa Cidenok Kabupaten Majalengka. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(10), 2599–2606. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i10.569>
- Zubaedi, Z., Utomo, P., & Musofa, A. A. (2021). Perilaku Sosial Masyarakat Bengkulu terhadap Penggunaan Media Sosial sebagai Diseminasi Informasi, Bimbingan Pribadi-Sosial dan Deradikalisasi. *Indonesian Journal of Community Services*, 3(2), 193. <https://doi.org/10.30659/ijocs.3.2.193-202>
- Zulfila. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Musrenbangdes(Studi Kasus Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis). *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), 104–116.